



RENCANA STRATEGIS (**RENSTRA**)

2025-2029



**KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karuniaNya, sehingga penyusunan Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Jombang merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Jombang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Jombang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan perlunya penyelarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen RPJMD serta mendorong penguatan kinerja pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis hasil (*result-oriented planning*). Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih Periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Harapan kami semoga Perubahan Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien,partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jombang, 19 September

2025 CAMAT JOMBANG



MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197206211998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	14
 PERANGAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jombang.....	14
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jombang.....	14
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Jombang	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang	32
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	95
2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah	101
2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD	104
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	104
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	104
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	106
2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	114
2.2.4 Isu-Isu Strategis.....	117
BAB III TUJUH, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	119
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jombang	119

3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Jombang	121
3.3	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	123
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	127
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	BIDANG URUSAN	132
4.1	Uraian Program	135
4.2	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, target dan pagu indikatif.....	138
4.3	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	203
BAB V	PENUTUP	205

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan pada tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5(lima) tahun mendatang.

Nilai strategis Kecamatan Jombang mencakup beberapa aspek penting. Secara umum, Kecamatan Jombang memiliki nilai strategis karena menjadi pusat pelayanan publik, lokasi proyek pembangunan, serta fokus pada pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Kecamatan Jombang dianggap optimal dalam mendukung kualitas pelayanan public di Kabupaten Jombang. Terdapat beberapa proyek strategis daerah yang akan dilaksanakan di Kecamatan Jombang pada tahun anggaran 2025, seperti pembangunan puskesmas, rekonstruksi jalan, peningkatan ruas jalan, rehabilitasi drainase dan pembangunan jembatan. Program TMMD ke 125 di Jombang tahun 2025 menekankan pada pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional. Rencana Strategis Kecamatan Jombang periode 2025-2029 menjabarkab visi, misi tujuan pembangunan daerah, dan program yang menjadi urusan perangkat daerah.

Nilai strategis potensi di Kecamatan Jombang pada Tahun 2025 terletak pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang didukung oleh kawasan strategis.

Pengembangan sektor unggulan Kecamatan Jombang memiliki potensi besar dalam pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung dan tebu, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Pengembangan sektor ini dapat ditingkatkan melalui modernisasi alat dan teknologi pertanian, peningkatan kualitas benih dan bibit, serta pengembangan system irigasi yang lebih baik. Selain sector pertanian juga potensi perkebunan dimana Kecamatan jombang memiliki potensi perkebunan tanaman seperti tebu, kelapa dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Pengembangan sector ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman, serta diversifikasi produk olahan perkebunan.

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 akan difokuskan pada penguatan sektor unggulan dan peningkatan infrastruktur, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Jombang sebagai bagian dari Kabupaten Jombang, akan menjadi fokus dalam pengembangan ini, sejalan dengan Visi Kabupaten Jombang yang ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Potensi sumber daya manusia di Kecamatan Jombang pada tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religious, dan berdaya saing global, sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Jombang “Hilirisasi Agrobisnis” yang menekankan penguatan sumber daya manusia dimana menjadi focus dalam pengembangan sumber daya manusia yang berarti potensi sumber daya manusia akan diarahkan untuk mendukung sector pertanian dan agrobisnis, termasuk pengelolaan hasil pertanian.

Perencanaan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten jombang Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional

sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah kabupaten Jombang, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Jombang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Jombang Pemerintah Kabupaten Jombang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Jombang dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni: (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) Bagaimana cara mencapainya dan, (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur bahwa dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang harus terkait/terhubung satu sama lain. Dokumen rencana suatu daerah juga harus mengacu pada rencana pembangunan daerah level atasnya maupun nasional sehingga pembangunan seluruh daerah terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada

rencana pembangunan daerah jangka pendek (tahunan) harus disinkronkan dengan rencana anggaran (penganggaran) sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan karena didukung oleh anggaran yang sesuai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan daerah yang disusun dan identic dengan realisasi janji politik Kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan dokumen RPJMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring denga proses pemilihan kepada daerah seretak di sleuruh daerah otonom di Indoneska pada tahun 2024, telah terpilih kepala daerah baru, tidak terkecuali di Kabupaten Jombang. **H.Warsubi, S.H.,M.Si.** dan **K.H.Salmanuddin Yazid S.Ag.,M.Pd.** telah terpilih dan bahkan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2025-2030. Visi, misi serta program prioritas (janji politik) kepala daerah selanjutnya harus dijabarkan ke dalam dokumen rencana pembangunan lima tahun melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-1137 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
17. Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah lain di daerah tersebut dan dengan dokumen rencana pemerintah di level

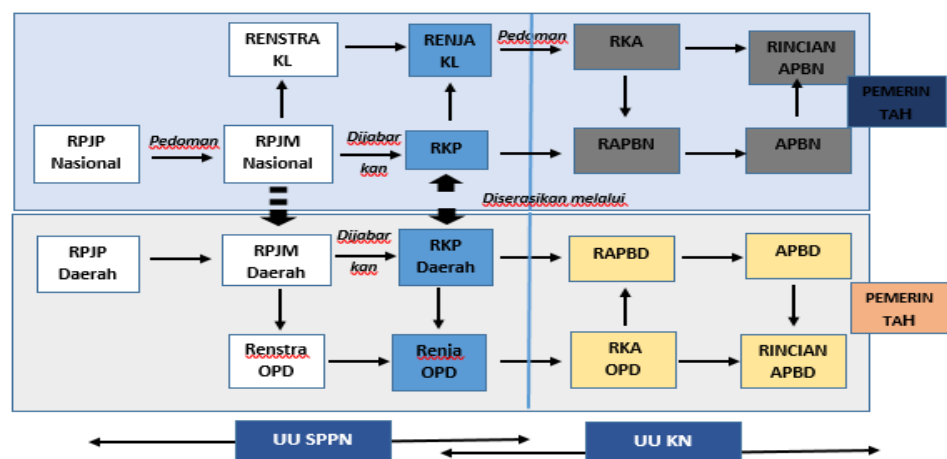
atasnya maupun nasional. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 juga menjelaskan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara lebih terperinci, sebagaimana terlihat dalam gambar 1.1.

Seiring dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan maka RPJMD Kabupaten Jombang harus memperhatikan hasil dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 juga akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah (PD) di Kecamatan Jombang pada periode 2025-2029.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sisten keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber: Data diolah, Kec. Jombang 2025

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jombang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang dan

kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jombang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang dengan mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

A. Hubungan Antara rancangan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Jombang tahun 2025-2029

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang memuat gambaran umum dan kinerja pelayanan setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab semua PD yang ada. Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang memuat permasalahan-permasalahan daerah, termasuk permasalahan setiap urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan PD. Data dan informasi terkait gambaran umum, kinerja maupun permasalahan setiap urusan ini harus minimal sama dengan yang tertuang dalam gambaran umum, kinerja, dan permasalahan dalam Renstra PD di Urusan yang bersesuaian. Renstra Kecamatan Jombang merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikator program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu/periode perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Jombang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 yang dimaksudkan adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai dasara dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Renstra Tahun 2025-2029 ini juga menjadi acuan dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah, dengan focus pada “**Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik Yang Prima**”.

Sementara itu tujuan dari penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Jombang tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjadi pedoman strategis bagi Kecamatan Jombang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan fasilitasi pelayanan public di wilayah kecamatan selama lima tahun ke depan;
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran PRJMD Kabupaten Jombang ke dalam lingkup kewenangan dan peran Kecamatan Jombang secara operasional dan terarah, melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program kegiatan prioritas kecamatan;
3. Menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dengan menjadikan Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja (Renja) Kecamatan dan instrument pengendalian serta evaluasi kinerja kecamatan;
4. Mendorong perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government) melalui perencanaan yang berbasis kinerja, berorientasi pada hasil, responsive terhadap kebutuhan masyarakat, dan terbuka terhadap dinamika lingkungan strategis;
5. Meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan dan pelayanan lintas desa, serta memperkuat energy antara kecamatan, pemerintah desa, forkompimcam, dan perangkat daerah lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Jombang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 disusun sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jombang, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Jombang tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN JOMBANG

Bab ini menguraikan beberapa subbab tentang: (1) Kondisi daerah terkini yang digambarkan melalui penyajian data dan informasi tentang hasil evaluasi pembangunan Kecamatan Jombang selama 5 tahun terakhir. Perkembangan capaian berbagai indikator kinerja disajikan untuk memberikan kondisi daerah di aspek goegrafi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum (penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah). Subbab ini menyajikan pula kinerja Kecamatan Jombang yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah; (ii) Kondisi (kemampuan) keuangan daerah da pengelolaannya selama lima tahun terakhir dalam mendukung pembangunan daerah, kondisi lima tahun terakhir ini dijadikan dasar dalam memproyeksikan kemampuan keuangan Kecamatan Jombang dalam melaksanakan progam dan kegiatan Kecamatan Jombang selama periode perencanaan tahun 2025-2030; (iii) Subbab permasalahan pembangunan dan isu strategis. Permasalahan pembangunan di Kecamatan Jombang mencakup permasalahan makro wilayah Kecamatan Jombang maupun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan dan isu-isu harus dijawab atau diselesaikan dalam pembangunan daerah di wilayah kerja Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS KECAMATAN JOMBANG

Bab ini menyajikan dua subbab, yaitu (i) Subbab Visi, Misi, Tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2025-2029; dan (ii) subbag Strategi, Arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Kecamatan Jombang tahun 2025-2029. Subbag pertama menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 serta penjabarannya ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada periode tersebut. Subbab ini menguraikan pula indicator kinerja utama dan daerah beserta target capaiannya setiap tahun selama periode perencanaan. Sementara itu, subbab kedua memuat cara atau strategi dan arah kebijakan umum maupun khusus pembangunan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan misi untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2025-2029 kecamatan Jombang maupun prioritas Bupati dan wakil Bupati Jombang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan dua bagian, yaitu (i) subbag Program Kecamatan Jombang; dan (ii) subbag Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Jombang, subbag pertama menguraikan daftar program kecamatan Jombang Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Subbag ini juga memuat indicator program, target dan pagu indikatif program Kecamatan Jombang beserta targetnya selama periode Tahun 2025-2030. Indikator kinerja Kecamatan Jombang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan Kecamatan Jombang atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jombang, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran program dan kegiatan Kecamatan Jombang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jombang

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jombang

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang. Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Jombang dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, secretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan asset Kecamatan, dan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- ✓ Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
- ✓ Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- ✓ Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- ✓ Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- ✓ Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatusahaan barang;
- ✓ Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- ✓ Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- ✓ Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi, dan
- ✓ Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

- ✓ Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan
- ✓ Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- ✓ Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- ✓ Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- ✓ Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- ✓ Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- ✓ Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- ✓ Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- ✓ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasi kependudukan dan catatan sipil;

- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melakukan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- h. Melaksanakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa;
- j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan asset desa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes dan LKPJ;
- m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan:

- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang social budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program – program bantuan sosial;

- f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan tugas Camat beserta pejabat struktural dibawahnya diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat setempat secara berjenjang.

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

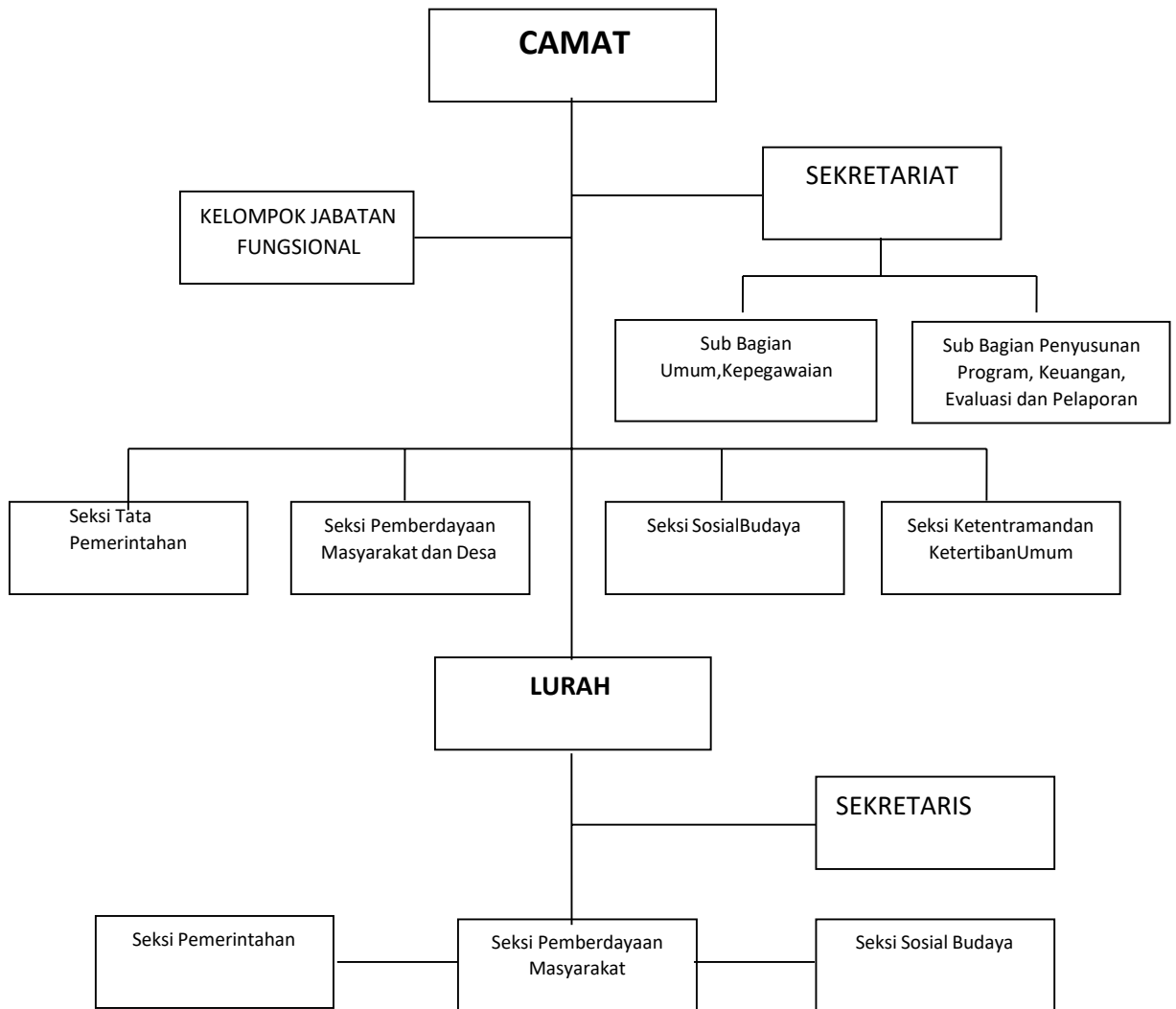
- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh Camat;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelurahan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sosial Budaya;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Jombang tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dan jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang per bulan Juni 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jombang



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Jombang

a. Sumber Daya Manusia Kecamatan Jombang

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber

daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

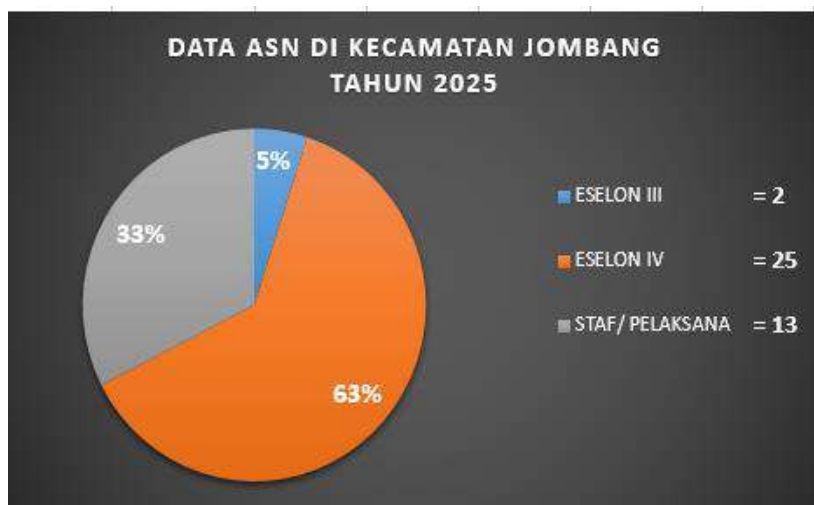
Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Jombang
Tahun 2025

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA
1	Pasca Sarjana	3
2	Sarjana (S1) atau sederajat	25
3	Sarjana Muda (Amd)	-
4	Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat	15
5	Sekolah Lanjutan Pertama atau sederajat	-
	Jumlah	43

Sumber: Data diolah, Kecamatan Jombang 2025

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Kecamatan Jombang yang terbanyak berpendidikan S1. Sedangkan untuk jabatan struktural rata-rata tingkat pendidikan adalah S1. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Pejabat struktural di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Eselon III terdiri dari 2 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 26 orang 10 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Kecamatan Jombang. Jumlah pejabat struktur dijelaskan pada gambar yang tertuang pada Grafik dibawah ini:

Gambar 2.2



Sumber: Data diolah Kecamatan Jombang 2025 (SIAP ASN)

Sedangkan untuk tingkat golongan dan berdasarkan jenis kelamin pada pegawai Kecamatan Jombang pada Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada table berikut:

Table 2.2
Data ASN Kecamatan Jombang berdasarkan Golongan Tahun 2025

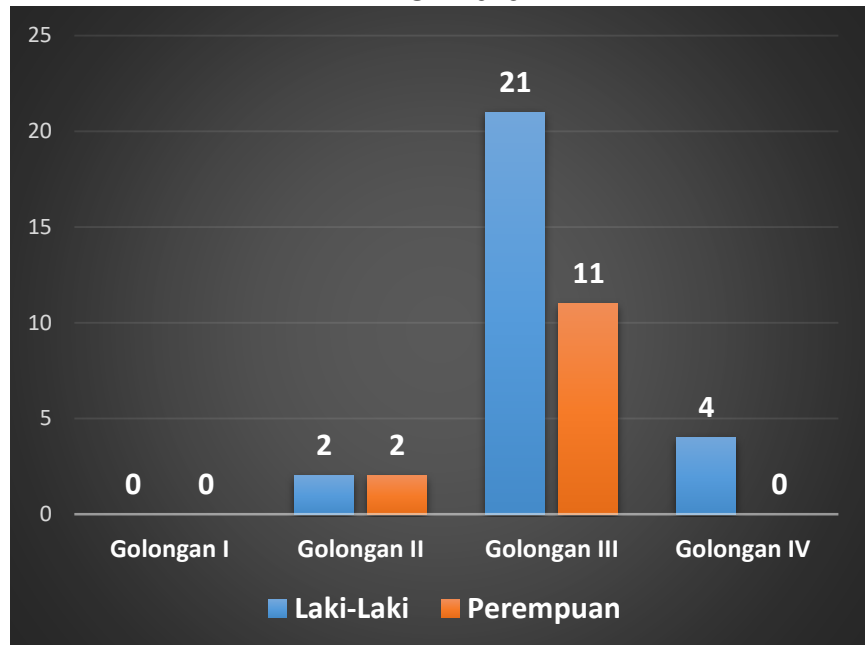
No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	2	2	4
3.	Golongan III	21	11	32
4.	Golongan IV	4	0	4
TOTAL		27	13	40

Sumber: Data diolah, Kecamatan Jombang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut diatas yang bahwa Data ASN yang dikelompokkan berdasarkan jenis Golongan maka dapat dilihat bahwa golongan ASN di Kecamatan Jombang yang terbanyak pada Jenis Golongan III sebanyak 32 orang yang terdiri dari 21 orang dengan Jenis Kelamin laki-laki dan 11 orang dengan jenis kelamin perempuan.

Dari tabel tersebut dilihat dapat juga digambar dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 2.3
DATA ASN KEC. JOMBANG MENURUT PANGKAT
GOLONGAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2025



Sumber: Data diolah, SIAP ASN Kec. Jombang, 2025

Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umur mampu menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, namun masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, khususnya yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.

➤ **Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)**

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Jombang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Tahun 2025

Jabatan	JENIS DIKLAT		
	Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
Struktural	Diklatpim IV 2 org Diklatpim IV 9 org	0	0
Fungsional Khusus	0	0	0
Fungsional Umum	0	0	0

Sumber : Data SIAP ASN, 2025

Dari table 2.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa pejabat structural yang ada yang telah mengikuti diklatpim III pada Tahun 2025 sebanyak 2 orang dan yang sudah mengikuti diklat penjeangan/ Diklatpim IV sebanyak 9 orang. Namun untuk tenaga fungsional umum belum ada yang mengikuti diklat teknis maupun fungsional. Oleh karena itu Kecamatan Jombang perlu mengusulkan personil / tenaga dari tenaga fungsional umum kepada BKDPP Kabupaten Jombang untuk diikutkan diklat teknis atau fungsional sesuai kebutuhan dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

➤ **Jumlah pegawai berdasarkan jabatan**

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Jombang berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	0
2.	Eselon III	2
3.	Eselon IV	25
4.	Pelaksana	13
Jumlah		40

Sumber: *Data SIAP ASN, 2025*

Pada Tabel 2.5 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN seluruhnya sebanyak 40 orang, dapat dijelaskan bahwa semua posisi jabatan eselon mulai eselon III sampai dengan IV yang ada telah terisi semua. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi saat ini dapat berjalan dan dikendalikan oleh pejabat yang mendudukinya sehingga kinerja organisasi diharapkan bisa berjalan dengan optimal.

b. Sarana dan Prasarana Yang Tersedia

Secara keseluruhan jumlah sarana prasarana/ perlengkapan kantor beserta kondisinya yang ada di Kecamatan Jombang dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dapat tersaji pada table sebagai berikut:

**Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana dan Kondisinya**

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	15	10	5	-
3	Mobil Siaga Desa	20	20	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	20	20	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	3	3	-	-
2	AC	26	26	-	-
3	Filling Besi	3	3	-	-
4	Lemari Besi	8	8	-	-
5	White Board	4	4	-	-
6	Lemari Kayu	8	8	-	-
7	Zice	1	1	-	-
8	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
9	Meja Rapat	15	15	-	-
10	Meja Tulis	21	21	-	-
11	Kursi Rapat	106	106	-	-

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
12	Kursi Biasa	131	131	-	-
13	Kursi Tamu	1	1	-	-
14	Bangku Tunggu	4	4	-	-
15	Kursi Lipat	57	57	-	-
16	Meja Tambahan	1	1	-	-
17	Jam	2	2	-	-
18	Kipas Angin	18	18	-	-
19	Kompor Gas	1	1	-	-
20	Alat Dapur lainnya	1 set	1 set	-	-
21	Televisi	11	11	-	-
22	Podium	1	1	-	-
23	P C	37	37	-	-
24	Laptop	24	24	-	-
25	Printer	48	48	-	-
26	CPU	1	1	-	-
27	Monitor	37	37	-	-
28	Meja kerja pejabat eselon III	2	2	-	-
29	Kursi kerja pejabat eselon III	2	2	-	-
30	Kursi kerja pejabat eselon IV	7	7	-	-
31	Soundsystem	7	7	-	-
32	Alat pemadam kebakaran	2	2	-	-
33	Papan nama instansi	1	1	-	-
34	Sofa	3	3	-	-
35	Lemari Es	1	1	-	-
36	Proyektor + Attachment	1	1	-	-
37	Generator	1	1	-	-
38	Gedung kantor permanen	7	7	-	-
39	Tempat ibadah permanen	1	1	-	-
40	Balai gedung pertemuan permanen	1	1	-	-
41	Rumah tempat tinggal permanen kelas Ia	1	1	-	-

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
42	Instalasi pusat pengatur listrik lainnya	1	1	-	-
43	Maket dan Foto dokumen lainnya	1	1	-	-

Sumber: Data ASPAK Keca. Jombang 2025

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat terlihat bahwa untuk kendaraan dinas secara umum tercukupi. Namun khusus roda 2 yang berada di Kecamatan meskipun jumlahnya cukup tetapi kondisi kendaraan sudah berumur tua. Sehingga diperlukan kendaraan dinas baru dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan barang / perlengkapan gedung kantor PATEN jumlah sampai saat ini masih sangat terbatas seperti: komputer, laptop, printer, LCD, scanner serta peralatan elektronik lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan kenyamanan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian diperlukan penambahan terhadap jenis-jenis barang tersebut.

Selain itu, luas bangunan Kantor Kecamatan Jombang yang cukup luas juga membutuhkan biaya pemeliharaan rutin yang cukup besar setiap tahun agar gedung dan bangunan dapat terjaga dan terawat dengan baik. Terhadap peningkatan pelayanan PATEN juga masih membutuhkan tambahan sarana prasarana seperti : ruang smooking area , saat ini sarana prasarana tersebut belum tersedia dan belum teranggarkan karena keterbatasan biaya.

c. Sarana Pendukung Organisasi

Keberadaan sarana pendukung akan berpengaruh terhadap laju gerak suatu organisasi. Mutu tingkat sumber daya manusia yang dimiliki, yang didukung dengan adanya sarana

yang memadai akan sangat berpengaruh pada kinerja dari organisasi. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sarana pendukung yang ada tanpa didukung oleh personal dengan kapabilitas yang memadai akan menambah deretan barang inventaris organisasi yang tidak efektif.

Untuk membantu tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sarana kerja yang terdapat di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sudah baik dan akan ditingkatkan sampai pada tingkat optimal. Artinya bahwa sarana yang ada sudah mampu mendukung beban kerja yang ada, walaupun belum secara optimal.

d. **Metode Organisasi**

Untuk mencapai tujuan visi, misi organisasi maka perlu dilakukan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola tugas dan sumber daya secara efektif dalam suatu organisasi, baik secara individu maupun dalam tim. Dalam hal ini akan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mengevaluasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Metode Organisasi Kecamatan yang melibatkan struktur organisasi, tugas dan fungsi yang terdefinisi, serta penerapan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Adapun ada beberapa aspek penting dari metode organisasi antara lain:

Perencanaan dimana menentukan tujuan strategis dan langkah langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan

Pengorganisasian yaitu membagi tugas, tanggung jawab dan alur kerja yang jelas untuk setiap anggota organisasi

Pelaksanaan yaitu Melakukan tugas dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengendalian yaitu dilakukannya pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, mengevaluasi kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah), maka pelaksanaan koordinasi (baik tingkat internal maupun eksternal) terus diupayakan. Penyebab kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan perencanaan, sebagian besar disebabkan karena lemahnya tingkat koordinasi. Untuk itu koordinasi harus selalu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan suatu keputusan atau kebijakan yang tepat dan konsisten dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi, baik dalam sektor-sektor tertentu maupun lintas sektor. Guna meminimalisir kekurangan serta kendala yang terjadi, maka diperlukan adanya standar metode kerja, Hal ini dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dilakukan review terakhir kali pada tahun 2022. Standar tersebut menginformasikan terkait langkah, pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jombang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, maka pada tahun berikutnya harus direncanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP). Akan tetapi sampai saat ini belum bisa terlaksana dikarenakan adanya penyesuaian prioritas pendanaan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

Kecamatan Jombang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan surat menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan public yang lebih responsive dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Jombang dari tahun 2021 hingga tahun 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Jombang berhasil direalisasikan dengan efektif.

Dapat dilihat pada tabel 2.6 indikator capaian kinerja Kecamatan Jombang:

Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jombang
Tahun 2018 s/d 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	NILAI IKM		√		84	84,4	N/A	N/A	N/A	84,85	85,47	N/A	N/A	N/A	101	107	N/A	N/A	N/A
2	<i>Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Jombang Minimal BAIK</i>				62,83	N/A	N/A	N/A	N/A	62,83	62,00	N/A	N/A	N/A	105	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				12	12	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
7	<i>Nilai Evaluasi SAKIP</i>				62,83	70,01	70,01	N/A	N/A	62,83	60,04	N/A	N/A	N/A	100,53	85,56	N/A	N/A	N/A
8	Persentase pemenuhan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan kelancaran administrasi perkantoran																		
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan Jombang				18	N/A	N/A	N/A	N/A	18	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kepanjen				13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Jekalombo				13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Jombatan				13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Kaliwungun				13	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang direhab				65	N/A	N/A	N/A	N/A	65	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				65	N/A	N/A	N/A	N/A	65	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Jombang				9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kelurahan Kepanjen				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kelurahan Jelakombo				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kelurahan Jombatan				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Kelurahan Kaliwungu				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
23	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara				150	N/A	N/A	N/A	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara Kecamatan Jombang				9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara Kelurahan Kepanjen				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara Kelurahan Jombatan				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kecamatan Jombang				5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kelurahan Kepanjen				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Kelurahan Jombatan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
30	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian Kecamatan Jombang				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian Kelurahan Jelakombo				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian Kelurahan Jombatan				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Jombang yang tersusun				-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Jumlah Dokumen Renja Kec. Jombang yang tersusun				4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun				4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Jombang yang tersusun				4	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Perubahan Renstra PD Tahun 2018 – 2023 (Pertama)																			
38	INDEKS REFORMASI BIROKRASI		√		N/A	60	62	62	N/A	N/A	N/A	48,60	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A
39	Nilai SAKIP				62,5	70,01	70,01	N/A	N/A	60,05	60,04	70,37	N/A	N/A	96,08	85	100,5	N/A	N/A
40	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
41	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
42	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dok			N/A	2	3	3	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
43	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	12 Lap			N/A	4	4	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
44	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
45	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
46	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Bulan			N/A	14	14	14	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	ASN lingkup Kecamatan Jombang yang difasilitasi																		
47	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
48	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Lap			N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
49	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Jombang</i>	100%			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
50	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi Kecamatan Jombang	13 jenis			N/A	13	13	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	7 jenis			N/A	7	7	7	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	terfasilitasi Kelurahan Kepanjen																		
54	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi Kelurahan Jelakombo	7 Jenis			N/A	7	7	7	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
55	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi Kelurahan Jombatan	7 Jenis			N/A	7	7	7	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
56	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi Kelurahan Kaliwungu	7 Jenis			N/A	7	7	7	N/A	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
57	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi Kecamatan Jombang	11 bulan			N/A	12	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi Kelurahan Kepanjen	11 bulan			N/A	11	-	-	N/A	N/A	11	-	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A
59	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi Kelurahan Jelakombo	11 bulan			N/A	11	-	-	N/A	N/A	11	-	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
60	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi Kelurahan Jombatan	11 bulan			N/A	11	-	-	N/A	N/A	11	-	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A
61	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi Kelurahan Kaliwungu	11 bulan			N/A	11	-	-	N/A	N/A	11	-	N/A	N/A	N/A	100	-	N/A	N/A
62	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
63	Jumlah pemenuhan barang penggandaan Kecamatan Jombang	16257 lembar			N/A	16257	15000	15000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
64	Jumlah pemenuhan barang penggandaan Kelurahan Kepanjen	5000 lembar			N/A	5123	2000	2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
65	Jumlah pemenuhan barang penggandaan Kelurahan Jelakombo	5000 lembar			N/A	950	2000	2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
66	Jumlah pemenuhan barang penggandaan Kelurahan Jombatan	5000 lembar			N/A	12474	2000	2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
67	Jumlah pemenuhan barang penggandaan Kelurahan Kaliwungu	5000 lembar			N/A	0	2000	2000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
68	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis			N/A	1	1	1	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
69	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 jkali			N/A	4	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	8 kompo nen			N/A	8	8	8	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
71	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kecamatan Jombang	10 unit			N/A	10	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kelurahan Kepanjen	6 unit			N/A	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
74	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kelurahan Jelakombo	6 unit			N/A	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
75	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kelurahan Jombatan	6 unit			N/A	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
76	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kelurahan Kaliwungu	6 unit			N/A	6	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
77	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
79	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi Kecamatan Jombang	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
80	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi Kelurahan Kepanjen	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
81	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi Kelurahan Jelakombo	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
82	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi Kelurahan Jombatan	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
83	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi Kelurahan Kaliwungu	12 bulan			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
84	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kecamatan Jombang	12 jenis			N/A	12	12	12	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
85	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kelurahan Kepanjen	7 jenis			N/A	7	7	7	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
86	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kelurahan Jelakombo	7 jenis			N/A	7	7	7	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
87	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kelurahan Jombatan	7 jenis			N/A	7	7	7	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
88	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum Kelurahan Kaliwungu	7 jenis			N/A	7	7	7	N/A	7	7	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
89	Jumlah penyediaan benda pos				N/A	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
91	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Kecamatan Jombang				N/A	-	28	28	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Kelurahan Kepanjen				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Kelurahan Jelakombo				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Kelurahan Jombatan				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara Kelurahan Kaliwungu				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya Kecamatan Jombang				N/A	28	-	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
97	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya Kelurahan Kepanjen				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya Kelurahan Jelakombo				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya Kelurahan Jombatan				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya Kelurahan Kaliwungu				N/A	-	-	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
101	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara Kecamatan Jombang				N/A	-	-	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara Kelurahan Kepanjen				N/A	15	-	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
103	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara Kelurahan Jelakombo				N/A	-	-	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
104	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara Kelurahan Jombatan				N/A	5	-	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
105	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Jombang yang dipelihara Kelurahan Kaliwungu				N/A	-	-	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
106	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara Kelurahan Kepanjen				N/A	1	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
107	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		√		N/A	7,74	7,79	7,84	N/A	N/A	N/A	84,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
108	IKM Kecamatan Jombang				83,58	84	84,4	87	N/A	84,85	85,47	87,74	N/A	N/A	N/A	101	103	N/A	N/A
109	IPP Kecamatan Jombang				N/A	3,17	3,17	3,17	N/A	2,8	3,15	-	N/A	N/A	N/A	97	-	N/A	N/A
110	Nilai Paten Kecamatan				N/A	81	82	83	N/A	79,75	83,38	84,47	N/A	N/A	N/A	101	101	N/A	N/A
111	<i>Persentase pelayanan terpadu</i>				N/A	100	100	100	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>(PATEN) yang sesuai standar</i>																		
112	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
115	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%			N/A	0	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
116	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA</i>	1 Keg			N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
117	<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>	4 Laporan			N/A	4	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
121	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
122	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan			N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
123	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan			N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
124	Persentase Laporan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
125	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawab an Realisasi APB Desa	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
126	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%			N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
127	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	32	32	32	N/A	N/A	32	32	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
128	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	32	32	N/a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
129	<i>Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu</i>				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
130	<i>Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi</i>				N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
131	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	36 Lembaga			N/A	36	36	36	N/A	36	36	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
132	<i>Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa</i>	32 Laporan			N/A	32	32	32	N/A	32	32	32	32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
131	<i>/Perubahan APB Desa yang tepat waktu</i>				N/A	26	26	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
133 134	<i>Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan</i>	36			N/A	36	36	36	N/A	36	36	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Masyarakat Desa yang dibina																		
	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa																		
133	/Perubahan APB Desa				N/A	26	26	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
135	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	16 20			N/A	16	16	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
136	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan		N/A	20	20	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
137	Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan musyawarah pembangunan Kelurahan	4 Kelurahan			N/A	4	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
138	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
139	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Kelurahan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah pembangunan sarana prasarana kelurahan Kepanjen				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
139	Jumlah pembangunan sarana prasarana kelurahan Jelakombo				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
140	Jumlah pembangunan sarana prasarana kelurahan Jombatan				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
141	Jumlah pembangunan sarana prasarana kelurahan Kaliwungu				2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A

Perubahan Renstra PD Tahun 2023 - 2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2. Indeks Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Jombang			N/A	83,58	84	84,4	N/A	N/A	84,85	85,47	87,74	N/A	N/A	N/A	101	103	N/A
		IPP Kecamatan Jombang			N/A	N/A	3,17	3,17	N/A	N/A	2,8	3,15	-	N/A	N/A	N/A	98	-	N/A
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100	N/A

		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desea/Perubahan APB Desa tepat waktu		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
1	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur		N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		N/A	N/A	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun		N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	N/A	5 dokumen	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A

	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		N/A	N/A	49 orang/bulan	49orang/bulan	45 orang/bulan	45 orang/bulan	49orang/bulan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%		N/A
		Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		N/A	N/A	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	N/A	12 dok	12 dok	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		N/A	N/A	1 dok	1 dok	1 dok	N/A	N/A	1 dok		N/A	N/A	N/A			N/A
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100	N/A	N/A	N/A	100%	100	N/A
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec Jombang		N/A	N/A	N/A	12 jenis	22 paket	N/A	N/A	N/A	12 jenis	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Jelakombo		N/A	N/A	N/A	10 jenis	15 paket	N/A	N/A	N/A	10 jenis	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	N/A
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Jombatan		N/A	N/A	N/A	10 jenis	15 paket	N/A	N/A	N/A	10 jenis	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	N/A
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen		N/A	N/A	N/A	10 jenis	15 paket	N/A	N/A	N/A	10 jenis	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	N/A
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Kaliwungu		N/A	N/A	N/A	10 jenis	15 paket	N/A	N/A	N/A	10 jenis	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	N/A
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Jombang		N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	11 paket	N/A	N/A	11 bulan	-	N/A	N/A	N/A	100%	-	N/A
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Jelakombo		N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	11 paket	N/A	N/A	11 bulan	-	N/A	N/A	N/A	100%	-	N/A
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Jombatan		N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	11 paket	N/A	N/A	11 bulan	-	N/A	N/A	N/A	100%	-	N/A

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Kaliwungu		N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	11 paket	N/A	N/A	11 bulan	-	N/A	N/A	N/A	100%	-	N/A
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen		N/A	N/A	11 bulan	11 bulan	11 paket	N/A	N/A	11 bulan	-	N/A	N/A	N/A	100%	-	N/A
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	20 jenis	10 jenis	10 paket	N/A	N/A	10 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kec Jombang		N/A	N/A	28450 lembar	28450 lembar	28450 lembar	N/A	N/A	28450 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Jelakombo		N/A	N/A	28450 lembar	28450 lembar	28450 lembar	N/A	N/A	28450 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Jombatan		N/A	N/A	28450 lembar	28450 lembar	28450 lembar	N/A	N/A	28450 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Kaliwungu		N/A	N/A	28450 lembar	28450 lembar	28450 lembar	N/A	N/A	28450 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel Kapanjen		N/A	N/A	28450 lembar	28450 lembar	28450 lembar	N/A	N/A	28450 lembar			N/A	N/A	100%		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	1 Dok	N/A	N/A	1 Jenis	1 Jenis	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	N/A	12 Kali	12 Kali	12 Kali	N/A	N/A	12 Kali			N/A	N/A	100%		
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan jOMBANG			N/A	N/A	0 stel	0 stel	0 stel	N/A	N/A	0 stel	0 stel	0 stel	N/A	N/A	0	0	0
		Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi		N/A	N/A	0 stel	0 stel	0 stel	N/A	N/A	0 stel	0 stel	0 stel	N/A	N/A	0	0	0
	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%

	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Jelakombo		N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Jombatan		N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Kaliwungu		N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen		N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	12 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		N/A	N/A	12 buah	12 bulan	24 Laporan	N/A	N/A	12 buah	12 bulan	24 Laporan	N/A	N/A	100%	100%	100%

	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			N/A	N/A	28 unit	28 unit	28 unit	N/A	N/A	28 unit	28 unit	28 unit	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																	
2	PROGRAM																	
	Nilai Paten Kecamatan Jombang			N/A	N/A	80	81	82	N/A	N/A	79,75	83,38	84,47	N/A	N/A	100	100	100
	KEGIATAN																	
	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100 %	100%	100 %
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dok	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3	Program																	
	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi			N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100%	100	100
	2. Jumlah Lembaga/ badan Kemasyarakatan Desa/ kelurahan yang aktif			N/A	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	N/A	36	36	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
	3. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja kelurahan			N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100 %
	4. Persentase Penyampaian laporan Kegiatan kelurahan Tepat waktu			N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
	kegiatan																	
	1. Jumlah pengajuan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang tepat waktu			N/A	N/A	N/A	32 laporan	32 laporan	N/A	N/A	N/A	32 laporan	32 laporan	N/A	N/A	N/A	100	100
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	N/A	36 Lembaga	36 Lembaga	N/A	N/A	N/A	36 Lembaga	36 Lembaga	N/A	N/A	N/A	100	100
	SUB KEGIATAN																	

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	KEGIATAN																	
	Persentase Pokmas dan Ormas yang difasilitasi			N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
		Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun Di Kel. Kaliwungu		N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %
		Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kel. Jombatan		N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %
		Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kel. Jelakombo		N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %
		Jumlah sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun di Kel. Kepanjen		N/A	N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100 %
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel Kaliwungu		N/A	N/A	N/A	N/A	24 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	24 Pokmas N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %

		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Kepnajan		N/A	N/A	N/A	N/A	22 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	22 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Jombatan		N/A	N/A	N/A	N/A	9 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	9 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kel. Jelakombo		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Pokmas	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jombatan		N/A	N/A	N/A	N/A	9 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	9 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kaliwungu		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina																	

		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	10 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan																
4	PROGRAM																	
	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	KEGIATAN																	
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan			N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.		N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	PROGRAM																	
	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	KEGIATAN																	
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen
	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen	N/A	N/A	32 dokumen	32 dokumen	32 dokumen

6	PROGRAM																	
	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%
	KEGIATAN																	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA			N/A	N/A	3 laporan	3 laporan	3 laporan	N/A	N/A	3 laporan	3 laporan	3 laporan	N/A	N/A	100	100	100
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam			N/A	N/A	4 Dok	4 Dok	4 Dok	N/A	N/A	4 Dok	4 Dok	4 Dok	N/A	N/A	100	100	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	100%	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan di beberapa layanan terdapat kesenjangan antara target kinerja layanan publik yang ditetapkan dengan capaian pelaksanaannya, seperti pada indikator nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Jombang pada Tahun 2024 tercapai 74,91 dengan target 75 sehingga tercapai 99,88% belum tercapai 100%. Namun pada indikator nilai layanan Nilai PATEN dengan nilai 92,64 dari target 85 sehingga 108,99%. Pencapaian nilai PATEN Kecamatan Jombang dapat dicapai karena beberapa faktor pendorong dan upaya yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Dukungan Pemerintah Daerah:

Adanya dukungan dan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas serta sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan PATEN.

2. Transmisi dan Pemahaman PATEN:

Transmisi informasi dan pemahaman yang baik mengenai PATEN kepada seluruh staf kecamatan dan masyarakat.

3. Struktur Birokrasi yang Efisien:

Struktur birokrasi yang dipangkas sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan

4. Sikap Petugas Yang Positif:

Sikap Petugas yang ramah dan responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Peningkatan kualitas Pelayanan:

Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

6. Ketersediaan Fasilitas dan Sarana Prasarana:

Fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PATEN.

7. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pelayanan.

8. Pengelolaan Pengaduan:

Adanya mekanisme pengelolaan pengaduan yang baik untuk menanggapi keluhan dan masukan masyarakat. Dengan adanya faktor-faktor pendorong dan upaya yang dilakukan secara konsisten, nilai PATEN di Kecamatan Jombang dapat ditingkakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Tabel TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan administrasi perkantoran	290.821.000	N/A	N/A	N/A	N/A	290.525.892	N/A	N/A	N/A	N/A	99.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	290.821.000	N/A	N/A	N/A	N/A	290.525.892	N/A	N/A	N/A	N/A	99.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	304.347.000	N/A	N/A	N/A	N/A	300.346.495	N/A	N/A	N/A	N/A	98.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembangunan gedung kantor/ bangunan pendukungnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Perencanaan strategis dan Pelpoaran capaian kinerja serta Keuangan SKPD	6.105.000	N/A	N/A	N/A	N/A	6.105.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	85.075.000	N/A	N/A	N/A	N/A	85.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	N/A	8.154.158.005	6.942.640.555	N/A	N/A	N/A	7.743.771.724	6.245.903.078	N/A	N/A	N/A	98%	96%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	N/A	29.563.750	6.355.000	N/A	N/A	N/A	29.505.300	6.124.100	N/A	N/A	N/A	98%	96%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat daerah	N/A	2.740.529.000	6.305.405.076	N/A	N/A	N/A	1.944.463.894	5.305.405.076	N/A	N/A	N/A	70,95	81.39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	0	13.800.000	N/A	N/A	N/A	0	12.814.000	N/A	N/A	N/A	0	98%	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	0	13.800.000	N/A	N/A	N/A	0	12.814.000	N/A	N/A	N/A	0	93	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	105.389.400	23.711.600	N/A	N/A	N/A	101.948.400	22.395.500	N/A	N/A	N/A	96.73%	94,45%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	N/A	30.719.000	24.198.000	N/A	N/A	N/A	30.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99.94%	N/A	N/A	N/A		
Kegiatan: Administarsi Kepegawaian Perangkat daerah	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	636.000.000	579.230.000	N/A	N/A	N/A	590.320.783	555.530.986	N/A	N/A	N/A	96,19	95,90	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	N/A	313.364.000	238.867.655	N/A	N/A	N/A	306.629.672	224.982.351	N/A	N/A	N/A	96.47%	94,18%	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	29.425.000	8.337.500	N/A	N/A	N/A	23.156.900	7.127.300	N/A	N/A	N/A	78.70	85	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	N/A	29.425.000	8.337.500	N/A	N/A	N/A	23.156.900	7.127.300	N/A	N/A	N/A	78.70	85	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	41.811.000	16.073.900	N/A	N/A	N/A	32.800.300	14.710.800	N/A	N/A	N/A	78,45 %	92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Fasilitas, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	41.811.000	16.073.900	N/A	N/A	N/A	32.800.300	14.710.800	N/A	N/A	N/A	78.45 %	92%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	N/A	25.100.000	17.722.500	N/A	N/A	N/A	24.937.500	N/A	N/A	N/A	N/A	99.35 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi kegiatan	N/A	52.647.500	36.973.500	N/A	N/A	N/A	27.850.000	24.230.500	N/A	N/A	N/A	99.35 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan desa																	
Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	52.677.900	25.173.500	N/A	N/A	N/A	51.300.000	21.922.500	N/A	N/A	N/A	85.92%	87.08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penrapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah	N/A	52.677.900	26.178.500	N/A	N/A	N/A	51.300.000	21.922.500	N/A	N/A	N/A	85.92%	87.08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	24.905.800	2.550.000	N/A	N/A	N/A	21.261.500	2.090.000	N/A	N/A	N/A	72.69%	82%	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	N/A	24.905.800	2.550.000	N/A	N/A	N/A	21.261.500	2.090.000	N/A	N/A	N/A	72.69%	82%	N/A	N/A	N/A	N/A
Renstra Sesuai Kepmen 050-5889																	
Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	N/A	N/A	N/A	3.037.280.272	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase dokumen perencanaan,	N/A	N/A	N/A	17.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
penanggungjawab dan evaluasi kinerja PD yang tercantum sesuai aturan																	
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	N/A	N/A	N/A	7.850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	9.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	N/A	N/A	N/A	6.005.081.669	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	5.748.491.669	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	89.610.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	N/A	N/A	N/A	40.920.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				000													
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kel. JelaKombo	N/A	N/A	N/A	40.920.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kel. Jombatan	N/A	N/A	N/A	40.920.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kel. Kapanjen	N/A	N/A	N/A	40.920.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kel. Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	3.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	3.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	495.679.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	32.311.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Jombatan	N/A	N/A	N/A	22.486.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	3.005.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kel. Kaliwungu																	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Jelakombo	N/A	N/A	N/A	11.115.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen	N/A	N/A	N/A	9.263.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	N/A	N/A	N/A	65.340.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah paket bahan logistic kantor yang Disediakan Kel. Jombatan	N/A	N/A	N/A	29.040.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah paket bahan logistic kantor yang Disediakan Kel Jelakombo	N/A	N/A	N/A	29.040.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah paket bahan logistic kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen	N/A	N/A	N/A	29.040.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah paket bahan logistic	N/A	N/A	N/A	29.040.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
kantor yang Disediakan Kel. Kaliwungu				000													
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	5.765.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. JOmbatan	N/A	N/A	N/A	7.348.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	455.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Kel. Jelakombo	N/A	N/A	N/A	5.246.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	3.550.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	N/A	N/A	N/A	2.352.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	27.965.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	4.704.920	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Jelakombo	N/A	N/A	N/A	884.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel. Kepanjen	N/A	N/A	N/A	3.406.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Paket Komponen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase realisasi pengadaan saranadan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	N/A	N/A	N/A	582.36 0.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
pemerintah daerah																	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	N/A	66.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. Jombatan	N/A	N/A	N/A	15.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel.Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	11.760.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel. jelakombo	N/A	N/A	N/A	8.100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	N/A	N/A	N/A	17.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Disediakan Kel. Keparjén																	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	52.01 3.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional ataulapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	N/A	N/A	N/A	31.262. 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya Kel. Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	1.500.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Jumlah Kendaraan Dinas	N/A	N/A	N/A	9.740.0 00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajakdan perijinannya Kel. Jelakombo																	
1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajakdan perijinannya Kel. Kepanjen	N/A	N/A	N/A	6.240.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	17.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	N/A	N/A	N/A	2.720.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kel. Kaliwungu																	
Jumlah Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kel. Jelakombo	N/A	N/A	N/A	9.740.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai Paten Kecamatan	N/A	N/A	N/A	18.014.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	N/A	N/A	N/A	18.014.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	18.014.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase PHBN/PHBA yang	N/A	N/A	N/A	13.302.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
dilaksanakan																	
Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	N/A	N/A	N/A	6.899.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	N/A	N/A	N/A	6.314.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	6.899.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	6.314.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	N/A	N/A	N/A	28.060.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	28.060.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugasdan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	28.060.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	N/A	N/A	N/A	18.055.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
APBDesa yang ditindaklanjuti																	
Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	N/A	N/A	N/A	18.055.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	18.055.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1. Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APBDesa yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	22.125.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Jumlah Lembaga/Badan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase rata-rata capaian kinerja kelurahan																	
Persentase penyampaian																	

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
laporan kegiatan kelurahan tepat waktu																	
Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	N/A	N/A	N/A	45.317.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pengajuan raperdes APBDes tepat waktu																	
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	45.317.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Pokmas/ormas yang difasilitasi																	
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Kel Jombatan	N/A	N/A	N/A	417.964.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun di Kel.	N/A	N/A	N/A	352.941.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kaliwungu																	
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Kel. Jelakombo	N/A	N/A	N/A	350.941.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun Kel. Kepanjen	N/A	N/A	N/A	352.908.607	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jombatan	N/A	N/A	N/A	119.858.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	235.237.667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jelakombo	N/A	N/A	N/A	680.981.932	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah pokmas	N/A	N/A	N/A	680.883.857	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kepanjen																	
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kel Jombatan	N/A	N/A	N/A	57.005.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	N/A	N/A	N/A	777.711.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kel. Jombatan	N/A	N/A	N/A	350.452.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kel. Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	302.220.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah sarana dan prasarana lembaga	N/A	N/A	N/A	75.014.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
kemasyarakatan yang disediakan Kel Jombatan																	
Jumlah sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan Kel . Kaliwungu	N/A	N/A	N/A	50.025.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	7.324.026.107	N/A	N/A	N/A	N/A	6.866.014.508	N/A	N/A	N/A	N/A	93.75	N/A	N/A
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	23.014.000	N/A	N/A	N/A	N/A	19.080.200	N/A	N/A	N/A	N/A	82,91	N/A	N/A
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	5.874.863.588	N/A	N/A	N/A	N/A	5.529.184.471	N/A	N/A	N/A	N/A	94	N/A	N/A
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	28.800.00	N/A	N/A	N/A	N/A	25.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	372.575.890	N/A	N/A	N/A	N/A	329.797.646	N/A	N/A	N/A	N/A	88.52	N/A	N/A
Kegiatan Pengadaan Barang Milik	N/A	N/A	N/A	N/A	232.629.430	N/A	N/A	N/A	N/A	226.416.650	N/A	N/A	N/A	N/A	97.33	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	612.995.001	N/A	N/A	N/A	N/A	576.896.022	N/A	N/A	N/A	N/A	94.11	N/A	N/A
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	179.148.209	N/A	N/A	N/A	N/A	158.839.519	N/A	N/A	N/A	N/A	88.66	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	17.660.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.114.500	N/A	N/A	N/A	N/A	91.25	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	17.660.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.114.500	N/A	N/A	N/A	N/A	91.25	N/A	N/A
Program Penyelenggaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	66.507.500	N/A	N/A	N/A	N/A	63.632.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.68	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Umum Pemerintahan Umum																	
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	66.507.500	N/A	N/A	N/A	N/A	63.632.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.68	N/A	N/A
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	18.580.000	N/A	N/A	N/A	N/A	18.446.750	N/A	N/A	N/A	N/A	99.28	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	18.580.000	N/A	N/A	N/A	N/A	18.446.750	N/A	N/A	N/A	N/A	99.28	N/A	N/A
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	17.310.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.477.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95.19	N/A	N/A
Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	17.310.000	N/A	N/A	N/A	N/A	16.477.000	N/A	N/A	N/A	N/A	95,19	N/A	N/A

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	4.007.258.044	N/A	N/A	N/A	N/A	3.709.140.388	N/A	N/A	N/A	N/A	92.56	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	86.360.000	N/A	N/A	N/A	N/A	80.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	93	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.521.439.183	N/A	N/A	N/A	N/A	2.245.929.327	N/A	N/A	N/A	N/A	89	N/A	N/A
Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	1.399.458.861	N/A	N/A	N/A	N/A	1.383.161.061	N/A	N/A	N/A	N/A	99	N/A	N/A

Tabel diatas merupakan evaluasi terhadap rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Jombang pada beberapa menampilkan data realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jombang mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Secara umum, rasio antara anggaran dan realisasi menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, hampir seluruh program dan kegiatan dapat tercapai 90% keatas. Tetapi tabel tersebut diatas tidak bisa menggambarkan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disebabkan karena adanya perubahan secara nomenklatur sesuai dengan peraturan sehingga terjadi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan mulai tahun 2020 sampai 2024.

Secara keseluruhan, Kecamatan Jombang menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dari tahun 2020 s/d 2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan diatas 80%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Jombang sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang cukup relevan, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Prosedur dan mekanisme pengelolaan Penganggaran Perangkat Daerah yang memiliki mekanisme perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kebutuhan riil di lapangan cenderung mampu mencapai realisasi anggaran yang tinggi.

Proses SIPD yang terstandar juga mendukung transparansi dan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran

2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia

Unit kerja yang memiliki staf keuangan dan perencana yang kompeten cenderung mampu menyusun perencanaan anggaran yang presisi, menyusun DPA dengan baik, serta melakukan pelaporan yang tertib. Sebaliknya, sub kegiatan yang berada di bawah kendali unit kerja yang kekurangan SDM atau memiliki beban kerja tinggi berisiko mengalami keterlambatan dan ketidaksesuaian realisasi anggaran.

3. Kesesuaian antara Progres Fisik dan Keuangan

Dalam banyak kasus, pelaksanaan kegiatan secara fisik yang terlambat juga akan menyebabkan serapan anggaran rendah. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, baik karena faktor eksternal seperti vendor, maupun internal seperti proses administrasi, akan menyebabkan belanja tidak terserap secara optimal.

4. Kebijakan Refocusing dan Perubahan Alokasi Anggaran.

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat kebijakan penyesuaian anggaran karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengurangan kegiatan nonprioritas. Ini dapat menjelaskan mengapa pada tahun-tahun tersebut banyak program dengan rasio realisasi yang sangat rendah.

5. Tingkat prioritas Program.

Kegiatan yang sifatnya rutin dan langsung mendukung pelayanan publik seperti gaji ASN, logistik perkantoran, hingga kegiatan koordinasi Forkopimcam cenderung mendapatkan realisasi tinggi. Sebaliknya, kegiatan yang bersifat administratif atau tambahan sering kali menjadi objek efisiensi.

Selain itu partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, pemanfaatan system keuangan kelurahan, dan system pengendalian internal sangat ikut berperan.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang memang tidak bisa terserap 100% seperti penyediaan jasa.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pada capaian Indikator Kinerja Utama

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

- Kurangnya optimalnya kualitas dan kuantitas SDM di tingkat kecamatan dapat menghambat pelaksanaan program dan capaian IKU.
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di Kecamatan yang menghambat tidak tercapainya target dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan. Maka perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan workshop secara berkala agar SDM Kecamatan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

b. Anggaran

- Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Alokasi anggaran yang tidak mencukupi dapat menyebabkan tertundanya kegiatan, kurangnya pengadaan sarana dan prasarana, tidak terlaksananya program dan kegiatan
- Adanya Refocusing pada tahun 2000 s/d 2021 karena adanya pandemi COVID-19 sehingga terjadinya pergeseran anggaran dan pemangkasan anggaran untuk dialokasikan pada anggaran pembiayaan COVID-19

c. Koordinasi

- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait di tingkat kecamatan, antar kecamatan atau antara kecamatan dengan pemerintahan daerah dapat menyebabkan

ketidaksielarasan program dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih program dan kegiatan.

- Koordinasi yang baik perlu ditingkatkan melalui rapat koordinasi rutin, forum komunikasi, atau pertemuan lintas sektor.

2. Faktor Eksternal

a. Perubahan kebijakan

Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kecamatan. perubahan kebijakan sehingga program dan kegiatan tidak berjalan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Jombang mencerminkan keberagaman aktor yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan. Kelompok ini secara garis besar terdiri dari pemerintah desa, masyarakat umum, dan lembaga/instansi kewilayahan, yang masing-masing memiliki karakteristik kebutuhan layanan yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dalam kerangka pelayanan publik dan tata kelola wilayah.

Pemerintah desa merupakan kelompok sasaran utama dan strategis dari layanan Kecamatan. Hal ini disebabkan karena kecamatan memiliki mandat sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, Kecamatan Jombang memberikan pelayanan berupa fasilitasi perencanaan pembangunan desa, penilaian dan pengesahan dokumen peraturan desa, pendampingan pelaksanaan musyawarah desa, pembinaan kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pelaporan

pertanggungjawaban pemerintahan desa. Selain itu, kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara desa dengan perangkat daerah teknis di kabupaten, misalnya dalam fasilitasi program Dana Desa, bantuan keuangan khusus, maupun intervensi program nasional.

Masyarakat umum merupakan penerima langsung dari berbagai bentuk layanan publik yang diselenggarakan kecamatan, baik yang bersifat administratif maupun fasilitatif. Melalui unit Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), masyarakat memperoleh layanan dokumen kependudukan seperti surat pindah, pengantar KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, legalisasi dokumen, serta surat keterangan umum yang dibutuhkan dalam urusan sosial dan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga menjadi sasaran kegiatan fasilitasi pembangunan kewilayahan seperti sosialisasi ketertiban umum, penyuluhan hukum, penyampaian informasi kebijakan daerah, serta penanganan konflik sosial. Kecamatan juga berperan sebagai ruang aspirasi dan aduan masyarakat atas dinamika pelayanan publik maupun kehidupan sosial di desa.

Lembaga atau instansi kewilayahan, seperti TNI/Polri, Koramil, Polsek, Puskesmas, KUA, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, juga menjadi kelompok sasaran layanan Kecamatan dalam konteks koordinasi lintas sektor. Kecamatan Jombang melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) berperan memfasilitasi sinergi lintas kelembagaan untuk menciptakan ketertiban umum, penanganan kejadian bencana, peringatan dini konflik, serta dukungan operasional pelaksanaan program sektoral di wilayah kecamatan. Kehadiran lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan efektivitas pelayanan lintas bidang, sehingga koordinasi reguler dan fasilitasi kerja sama

menjadi bagian dari fungsi pelayanan Kecamatan yang menyasar kelompok ini.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2025–2029, dilakukan penelaahan dan analisis terhadap dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pelayanan Kecamatan Jombang selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah kabupaten secara keseluruhan.

Penelaahan terhadap dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dalam periode 2025–2029, Kemendagri mengarahkan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berbasis data. Fokus utamanya meliputi: penguatan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas pemerintahan kewilayahan (termasuk kecamatan), serta penguatan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja berbasis outcome. Dalam konteks ini, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berada pada level paling dekat dengan masyarakat diarahkan untuk menjadi garda terdepan pelayanan yang cepat, sederhana, dan menjangkau hingga tingkat desa /kelurahan.

Lebih lanjut, dalam Renstra Kementerian Desa PDTT, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan fasilitasi pembangunan berbasis potensi lokal. Bagi Kecamatan Jombang, arah kebijakan ini relevan karena peran Kecamatan sangat erat dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan sinergi program pembangunan antara desa dan kabupaten.

Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, khususnya Bappeda, Dinas PMD,

Disdukcapil, dan Satpol PP, menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan mandat dan fungsi pelayanan Kecamatan Jombang. Bappeda Kabupaten Jombang mengarahkan perangkat daerah untuk berorientasi pada penguatan sistem perencanaan yang partisipatif dan berbasis data wilayah. Kecamatan sebagai unit yang menjangkau langsung desa dan kelurahan menjadi pelaksana utama dalam pengumpulan data perencanaan, validasi usulan masyarakat, serta fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan.

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Resntra) Kecamatan Jombang adalah seluruh elemen masyarakat yang menjadi fokus pelayanan dan pembangunan di tingkat Kecamatan. Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Jombang mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan dan berhak atas layanan publik secara umum, kelompok tersebut meliputi:

- Pendudukan Kecamatan Jombang: merupakan seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Jombang.
- Pemerintah Kecamatan: aparat dan Instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik.
- Lembaga Non Pemerintah: Organisasi masyarakat, LSM, dan lembaga swadaya lainnya yang beroperasi di wilayah Kecamatan.
- Dunia Usaha: Pelaku bisnis dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Jombang.
- Kelompok Masyarakat: Berbagai kelompok social, komunitas dan organisasi berbasis masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan.
- Keluarga: Unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi focus perhatian dalam berbagai program layanan.

- Remaja Putri: Kelompok usia remaja putri yang memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan Reproduksi dan pendidikan.
- Calon Pengantin: Pasangan yang akan menikah dan memerlukan layanan terkait pernikahan dan keluarga.
- Ibu Hamil: Perempuan yang sedang mengandung dan memerlukan pelayanan kesehatan dan gizi.
- Ibu Menyusui: Perempuan yang sedang menyusui dan memerlukan pelayanan kesehatan dan gizi
- Anak Usia 6-59 Bulan: Balita yang memerlukan pelayanan kesehatan, gizi dan tumbuh kembang sebagai pencegahan stunting.

Selain itu, seluruh desa-desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Jombang juga merupakan dalam kelompok sasaran layanan, karena desa merupakan unit administrasi terkecil yang dilayani oleh Kecamatan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041, Kecamatan Jombang merupakan salah satu kawasan strategis yang diarahkan sebagai kawasan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Kabupaten Jombang. Posisi Kecamatan ini terletak di tengah kabupaten dan dilalui jalan nasional yang menghubungkan Surabaya dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Jombang merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi serta penduduk terbanyak di Kabupaten Jombang yaitu 143 ribu jiwa ditahun 2024. Kecamatan Jombang memiliki infrastruktur yang lengkap dari stasiun kereta api, rumah sakit, alun-alun dan taman kota, tempat peribadatan, tempat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga mall, pondok pesantren, perguruan tinggi agropolitan dan kawasan penyangga pertanian sekaligus kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah timur kabupaten. Kecamatan ini dilalui jaringan jalan utama dan berada dalam jalur distribusi logistik yang menghubungkan kawasan industri ringan dan sentra produksi pertanian. Hal ini menjadikan

Kecamatan Jombang memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta pengembangan pelayanan publik, khususnya yang berbasis agribisnis, UMKM, dan pelayanan dasar. Selain itu, pola ruang dalam RTRW juga mengidentifikasi sejumlah desa di Jombang sebagai wilayah yang rawan terhadap tekanan ruang, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri, yang berdampak pada kompleksitas pengelolaan ruang dan kebutuhan penataan ulang sistem pelayanan wilayah.

Sementara itu, hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 menyoroti beberapa isu strategis lingkungan yang memiliki keterkaitan erat dengan pelayanan kecamatan. Salah satunya peningkatan pengelolaan persampahan dan pencemaran. Isu ini dirumuskan dari integrasi isu strategis masukan stakeholders, yaitu belum optimalnya pengelolaan persampahan dan peningkatan ancaman pencemaran akibat aktivitas domestik, industri dan perkotaan, dengan isu dari capaian TPB Kabupaten Jombang yang terkait dengan kualitas air sungai sebagai sumber air baku yang menurun, termasuk karena pencemaran yang berdampak pada risiko konflik sosial, degradasi sumber daya air, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar di desa-desa yang masuk dalam zona transisi agraris-industri. Di sisi lain, KLHS juga menekankan pentingnya keadilan spasial dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal untuk menjaga kualitas lingkungan dan social masyarakat.

Sebaliknya, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

- Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi lintas desa dalam pengendalian pembangunan berbasis ruang,
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan administrasi terpadu (PATEN),

- Pengembangan model pelayanan berbasis komunitas dan partisipatif di desa-desa dengan dinamika sosial tinggi,
- Integrasi program pelayanan dengan agenda ketahanan sosiallingkungan seperti mitigasi konflik lahan, edukasi lingkungan, dan pengelolaan bencana skala lokal.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, jenis pelayanan yang perlu diperkuat antara lain:

- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KTP, KK, dan surat pindah);
- Layanan fasilitasi pembangunan desa (pengawasan kegiatan fisik, pembinaan BPD, musyawarah desa);
- Pelayanan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban (penanganan konflik sosial, pengawasan hiburan, mediasi masyarakat);
- Koordinasi pembangunan lintas sektor (rapat Forkopimcam, pemantauan kegiatan OPD di wilayah kecamatan);
- Pelayanan penanganan bencana dan lingkungan (sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pemantauan dampak pembangunan).

Dengan demikian, melalui telaahan terhadap RTRW dan KLHS, Kecamatan Jombang dapat menyusun strategi pelayanan yang lebih tepat sasaran, berbasis spasial, dan proaktif terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang dinamis. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Jombang tidak hanya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam pemberian layanan Kecamatan Jombang selain kelompok sasaran layanan juga bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan

Jombang maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Jombang, yaitu:

1. Polsek Kecamatan Jombang sebagai penyedia layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik social, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
2. Koramil Jombang untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan social masyarakat.
3. Puskesmas di wilayah Kecamatan Jombang untuk melakukan pelaksanaan dalam masalah kesehatan di lingkungan kecamatan, serta pengurusan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu (program Yankesmskin).
4. Kantor Urusan Agama guna melakukan pengurusan Dispensasi nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
5. Bappeda memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kecamatan guna memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Jombang berjalan dengan baik dan terarah.
6. DPMPD merupakan dinas terkait kecamatan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMPD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
7. Dispendukcapil merupakan mitra kerja kecamatan dalam hal layanan penerbitan Akta Kelahiran di Kecamatan dan

penerbitan Kartu Keluarga di Kecamatan serta perekaman KTP-el bagi pemula.

8. Tim penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP-PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Jombang.
9. Inspektorat juga merupakan mitra kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatihan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan masyarakat dari Kecamatan.
10. Bapenda merupakan mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
11. Dinas Sosial adalah mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa), orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan social, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan social. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
12. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan, kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat. Fungsi Kelurahan memiliki tugas membantu kecamatan dalam melaksanakan sebagian tugasnya, termasuk urusan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan.

13. Bagian Tata pemerintahan Kabupaten Jombang merupakan mitra perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perangkat kecamatan dibantu oleh tata pemerintahan dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Bagian tata pemerintahan ini bersinergi dalam melaksanakan capaian kinerja dalam berbagai aspek diantaranya aspek pelayanan public pemerintahan umum.

2.1.4.2 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Jombang dapat berupa berbagai bentuk seperti bantuan teknis, penyediaan sumber daya atau kerjasama dalam pelaksanaan program,. BUMD seperti PERUMDA Aneka Usaha Seger diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten jombang, yang pada gilirannya dapat mendukung program-program di tingkat Kecamatan.

2.2 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan

Sehubungan dengan kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang memadukan

pendekatan politik, tenokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan dan dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategis pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategis yang baik harus menunjukkan konsisten dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentuka isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat daerah, maka dilakukan identifikasi permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Adapun beberapa permasalahan pelayanan kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 T-B.35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya kapasitas aparatur desa	Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan	Minimnya pelatihan pendampingan, dan pembinaan teknis terkuat regulasi dan administrasi desa
2.	Terbatasnya kualitas SDM kecamatan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Kurangnya sarana dan prasarana kerja kecamatan	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan	Terbatasnya anggaran pengadaan dan pemeliharaan fasilitas
4.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public	Kurangnta inovasi layanan, keterbatasan SDM pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi
5.	Belum terintegritasnya system informasi wilayah	Belum ada system informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa	Belum tersedia platform data bersama, kurangnya infrastruktur jaringan dan belum ada kebijakan integritasi sistem
6.	Lemahnya pemberdayaan kelembagaan desa	Kurangnya pembinaan desa terhadap badan usaha dan lembaga pemberdayaan desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya	Minimnya peran kecaatan dalam pendampingan kelembagaan desa dan belum ada sinergi program pemberdayaan lintas sektor

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kecamatan Jombang merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menjalankan tugas atas pelimpahan sebagai urusan pemerintahan umum dan Bupati. Tugas tersebut mencakup pelayanan publik, administrasi, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan lintas sektor, fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Jombang 2025-2029, tugas tersebut sangat relevan dengan visi daerah: **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”**.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan Jombang secara spesifik dan dominan berkontribusi terhadap Misi ke-5, **“Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif”**.

Pelaksanaan Misi ke-5 tercermin dalam pelaksanaan tugas Kecamatan seperti:

- Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diarahkan menjadi layanan publik yang akuntabel, cepat, dan transparan.
- Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan (Musrenbang), sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif dan akuntabel.
- Pelaksanaan fungsi koordinasi antarinstansi kewilayahan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), untuk menjaga sinergi program dan respons terhadap isu-isu wilayah.
- Penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui pembinaan regulatif, pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (BPD, LPM, RT/RW).

- Penyebarluasan informasi publik dan fasilitasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang terbuka.

Dengan kata lain, Kecamatan Jombang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat hadir hingga ke level paling bawah, yaitu desa/kelurahan dan masyarakat. Peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kepala daerah untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, yaitu **“Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif”**, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat yang secara langsung mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jombang. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam mengidentifikasi tantangan dan potensi strategis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan koordinasi kewilayahan ke depan.

1. Faktor Pendorong

- Tersedianya program pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas aparatur dari perangkat daerah teknis (BKPSDM, DPMD).
- Kesadaran pemerintah daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa.
- Potensi ekonomi desa yang beragam dan dapat dikembangkan secara kolaboratif oleh lembaga desa.
- Dukungan dari unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan terhadap kegiatan pembinaan ideologi dan bela negara.

2. Faktor Penghambat

- Belum meratanya akses terhadap pelatihan atau bimbingan teknis yang bersifat praktis dan berkelanjutan.
- Masih terdapat fasilitas pelayanan di kecamatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, seperti jaringan internet, ruang pelayanan ramah disabilitas, perlengkapan digital, area parkir khusus pelayanan
- Masih rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDesa/BUMDesma.
- Menurunnya tingkat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis nilai kebangsaan.

Asta cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sector. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Ke 17 program prioritas nasional tersebut adalah:

1. Mencapai Swasembada pangan, energy dan air
2. Penyempurnaan system penerimaan negara
3. Reformasi politik, hokum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia; peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara
10. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan
11. Pelestarian lingkungan hidup
12. Ketersediaan pupuk dan benih bagi petani

13. Rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat
14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM
15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan Maritim
16. Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah
17. Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan ke 17 program dalam rangka menyelenggarakan 8 misi pembangunan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 telah menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sekaligus program unggulan dalam pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan social serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Arahan akhir RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045 telah memberikan arahan kebijakan pembangunan lima tahunan selama periode tersebut. Arah kebijakan tahap pertama akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2025-2029. Pada tahap ini pembangunan Kabupaten Jombang difokuskan pada penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis, mencakup penguatan modal dasara pembangunan, yaitu Sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur, regulasi yang mendukung kemantapan ekonomi inklusi, social, budaya dan ketentraman serta ketertiban umum.

RPJPD Kabupaten Jombang telah menetapkan misi pembangunan jangka panjang dan pada setiap misi telah diuraikan focus pembangunan pada periode/ tahap lima tahun pertama (2025-2029). Fokus pengembangan untuk setiap misi pembangunan jangka panjang diuraikan sebagai berikut:

- Misi 1, Mewujudkan transformasi social yang berkesinambungan, difokuskan pada: (a) Penguatan pondasi system pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang maju guna menjamin akses dan level pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing regional dan nasional; (b) Intergrasi pendidikan formal maupun non formal yang dimulai dari pendidikan keluarga; (c) Penataan system jaminan sosial yang mantap sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar perlindungan sosial (PPKS) melalui sinergi lintas sectoral secara efektif menurunkan ketaipangan dan mengatasi kemiskinan (menghapus kemiskinan ekstrim) serta menjamin kesetaraan bagi disabilitas.
- Misi 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif, difokuskan pada (a) Penguatan kebijakan dan kelembagaan ekonomi inklusif yang didukung stabilitas makro menuju integrasi ekonomi domestik guna optimalisasi perdagangan, perindustrian, pertanian, pariwisata (Tourism) dan berpihak kepada sektor strategis Industri Kecil, Koperasi,

Usaha Mikro serta Ekonomi Kreatif; (b) Penataan regulasi dan kebijakan pendukung implementasi ekonomi hijau (Green Economy) untuk mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) menuju net / zero Industry serta implementasi iptek dan inovasi pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan daerah didukung sarana prasarana investasi yang daya saing.

- Misi 3, Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, difokuskan pada Penataan kelembagaan tepat fungsi, penyederhanaan regulasi yang menunjang pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), didukung dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang kompeten dan gesit (Agile).
- Misi 4, Memantapkan Infrastruktur Pendorong Pemerataan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, difokuskan pada (a) Penguatan regulasi dan kebijakan infrastruktur yang berorientasi pada pemantapan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan kewilayahan, percepatan transformasi digital dan pendukung ketahanan energi, air serta ketahanan pangan; (b) Penataan regulasi dan kebijakan serta implementasi pendukung ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan jangka panjang.
- Misi 5, Memantapkan Kondusifitas Daerah, Ketahanan Sosial dan Budaya yang Berkualitas, difokuskan pada (a) Penguatan Kebijakan Konsolidasi Kelembagaan berbasis masyarakat dalam pembangunan kesadaran hukum, demokrasi dan ketentraman, ketertiban umum dalam masyarakat; (b) Penataan kebijakan dan penguatan struktur kelembagaan pemerintah daerah serta implementasi gerakan kesadaran budaya, kualitas keluarga dan kesetaraan gender kepada masyarakat.

Tabel 2.9
Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Yang Mempengaruhi
Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

No	Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Tujuan Kecamatan	Sasaran Kecamatan	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua	Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif Profesional	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	3. Keterbatasan anggaran 4. Kurangnya jumlah personil aparatur 5. Kompetensi personil aparatur pelayanan yang masih rendah 6. Minimnya kewenangan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Motivasi Camat kepada bawahan dalam bentuk pemberian reward dan punishment dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Jombang 2. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih efisien dan merupakan prinsip good governance

2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041, Kecamatan Jombang merupakan salah satu kawasan strategis yang diarahkan sebagai kawasan agropolitan dan kawasan penyangga pertanian sekaligus kawasan pertumbuhan ekonomi wilayah kecamatan kota di Kabupaten Jombang.

Kecamatan ini ditengah tengah dilalui jaringan jalan utama dan berada dalam jalur distribusi logistik yang menghubungkan kawasan industry ringan dan sentra perekonomian. Hal ini menjadikan kecamatan Jombang memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas antar wilayah serta pengembangan pelayanan public, khususnya yang berbasis agribisnis, UMKM, dan pelayanan dasar. Selain itu, pola ruang dalam RTRW juga mengidentifikasi sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Jombang sebagai wilayah yang rawan terhadap tekanan ruang, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industry, yang berdampak pada kompleksitas pengelolaan ruang dan kebutuhan penataan ulang system pelayanan wilayah.

Sementara itu, dari telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, diperoleh gambaran bahwa kawasan Jombang termasuk wilayah dengan tingkat tekanan lingkungan yang mulai meningkat, terutama akibat pertumbuhan kawasan pemukiman dan industry KLHS menyoroti tantangan seperti penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi pencemaran air tanah, dan ketimpangan dalam akses terhadap air bersih dan sanitasi. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki potensi dalam pengembangan pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui edukasi masyarakat, penguatan kapasitas desa dan kelurahan dalam mitigasi risiko lingkungan, serta peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pelayanan public di Kecamatan Jombang perlu mempertimbangkan konteks ekologis dan kerentanan lingkungan, agar pelayanan yang diberikan tidak hanya merata, tetapi juga berkelanjutan secara special dan social.

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah.

1. Faktor Pendorong

- Adanya penetapan Kecamatan Jombang sebagai kawasan strategis agropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota dalam RTRW Kabupaten Jombang
- Ketersediaan infrastruktur dasar wilayah (jalan utama, konektivitas antar desa/kelurahan) yang mendukung akses dan distribusi pelayanan publik.
- Arahan penggunaan ruang yang jelas dalam RTRW, sehingga mempermudah penentuan prioritas lokasi pelayanan dan penataan wilayah
- Dukungan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam KLHS, yang mendorong pelayanan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi risiko
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, membuka peluang partisipasi dalam layanan berbasis edukasi lingkungan.
- Potensi penguatan kolaborasi antar instansi wilayah (kecamatan, desa dan kelurahan, OPD teknis, masyarakat) dalam pemantauan ruang dan kualitas lingkungan.

2. Faktor Penghambat

- Ketidaksihesuaian antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang actual, terutama akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman/ industry
- Tingginya tekanan lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kualitas tanah, kepadatan penduduk. Dan konversi lahan produktif di desa-desa padat aktivitas.
- Keterbatasan fasilitas pelayanan dasar lingkungan, seperti sanitasi, pengelolaan air bersih dan system drainase, terutama di zona pertumbuhan baru.
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan kecamatan dalam pemantauan dampak pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

- Minimnya integrasi data special dan ekologis dalam perencanaan pelayanan publik, yang menyulitkan alokasi layanan berbasis risiko dan kebutuhan actual.
- Kurangnya system pengawasan dan penegakan aturan tata ruang di tingkat local, yang melemahkan efektivitas pelayanan berbasis tata ruang berkelanjutan.

2.2.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi dimana daerah tersebut belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau gambaran umum kondisi Kecamatan Jombang pada periode sebelumnya (2018-2023). Isu strategis Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Teknik Penentuan Isu strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pemahaman apparatus desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/ kelurahan • Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan • Belum terpenuhinya sarana dan 	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	• Kemiskinan dan stunting	• Kurang berkembangnya BUMDes dan BUMDesma	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan pedesaan • Penguatan wawasan kebangsaan • Berkembangnya intoleransi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kualitas SDM di tingkat kecamatan dan desa/ Kelurahan • Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public • Peran BUMDes, BUMDesma, Lembaga dan pemberdayaan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	prasarana yang menunjang kinerja kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public • Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa • Kurangnya pembinaan desa terhadap badan usaha dan lembaga pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya 					desa/ Kelurahan belum optimal dalam pembangunan desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jombang

dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, inklusif, dan berbasis kinerja. Kecamatan Jombang menetapkan tujuan strategis yang selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut secara khusus mendukung pencapaian salah satu sasaran pembangunan daerah, yakni: ***“Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.”*** Tujuan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan public yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa/kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Jombang. Pelayanan publik yang berkualitas menuntut keterpaduan tata kelola, kemampuan aparatur yang mumpuni, serta prosedur layanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan tujuan yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Jombang adalah: ***“Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.”*** Tujuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kerjasama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan di tingkat wilayah, termasuk pemerintah desa, unsur Forkopimcam, lembaga masyarakat, dan perangkat daerah teknis lainnya. Sinergitas ini mencakup koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan program, pelayanan administrasi, hingga penanganan isu-isu strategis kewilayahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Kecamatan Jombang juga berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK menjadi instrumen penting yang memastikan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan kerangka hukum nasional, menjamin keseragaman mutu, dan dapat dievaluasi secara sistemik oleh pemerintah di atasnya. Melalui penerapan NSPK, kecamatan menjalankan fungsinya dalam lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan standar yang dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergitas kecamatan yang berpedoman pada NSPK merupakan fondasi utama dalam mendukung visi dan misi kepala daerah, serta menjadi perwujudan nyata dari kehadiran negara dalam pelayanan langsung kepada masyarakat. Ke depan, Kecamatan Jombang diharapkan mampu mengembangkan model pelayanan yang lebih adaptif, berbasis digital, partisipatif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan tujuan jangka menengah Kecamatan Jombang beserta indikatornya disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Jombang

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75	75,5	76	76,5	77	77,5

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, Kecamatan Jombang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati menetapkan arah pembangunan lima tahunan melalui tujuan dan sasaran yang terukur serta relevan dengan konteks kewilayahan. Tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Jombang pada periode 2025–2029 adalah ***Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan***. Tujuan ini mencerminkan upaya strategis untuk membangun pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga inklusif, mudah dijangkau, serta diselenggarakan secara terpadu antar pemangku kepentingan. Kualitas pelayanan publik di sini juga mengandung makna efektivitas kinerja kecamatan dalam mendukung kelancaran administrasi, fasilitasi pembangunan desa, serta penanganan persoalan lintas wilayah secara responsif.

Pelayanan yang berkualitas tidak dapat diwujudkan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antar unsur

pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk dengan pemerintah desa, Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, serta perangkat daerah teknis di kabupaten. Sinergitas yang dimaksud merupakan bentuk kolaborasi yang terencana dan berkesinambungan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan umum, pelayanan administratif, fasilitasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Kecamatan Jombang menetapkan dua sasaran strategis.

Sasaran pertama adalah “***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik***. Sasaran ini bertujuan untuk memenuhi tingkat pelayanan secara efisien dan efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan. Hal ini mencakup kegiatan seperti fasilitasi penyusunan perencanaan desa, pembinaan kelembagaan, koordinasi musyawarah pembangunan, serta mediasi permasalahan antar desa. Sinergitas ini juga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini diukur melalui peningkatan indeks kepuasan masyarakat, kecepatan pelayanan, serta profesionalisme aparatur.

Sasaran kedua adalah “***Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif***.” . Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan melalui penguatan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi. Akuntabilitas di sini mencakup pengelolaan program dan anggaran secara transparan, pelayanan publik yang memenuhi standar mutu, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional. Dalam pelaksanaan kedua sasaran tersebut, Kecamatan Jombang senantiasa mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

sebagai pedoman teknis agar pelayanan yang diberikan sejalan dengan kebijakan nasional, terukur secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan secara jelas dan terarah ini, Kecamatan Jombang diharapkan mampu meningkatkan peran strategisnya sebagai penyedia layanan terdepan dan simpul koordinasi pemerintahan di tingkat kewilayahan, yang mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu. Teknik perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD
Kecamatan Jombang

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jombang										
Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan public	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8	8,05	8,1	8,15	8,17	8,2	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72	73	74	75	76	77	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam

menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dalam konteks pengembangan daerah sesuai dengan pentahapan pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026-2030, fokus strategi Kecamatan Jombang diarahkan ***pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif***. Strategi ini bertumpu pada peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan pelayanan, serta pengembangan sistem administrasi dan pengawasan yang berbasis digital dan partisipatif.

Untuk mendukung implementasi strategi dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra secara bertahap, disusunlah penahapan pembangunan tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan masing-masing tahun selama periode 2025–2029. Penahapan ini memberikan gambaran fokus capaian tahunan Perangkat Daerah, baik dalam konteks peningkatan kinerja pelayanan, penguatan kelembagaan, maupun dukungan terhadap kebijakan prioritas daerah. Penahapan dilakukan secara bertingkat dan logis, dimulai dari fondasi penguatan sistem dan kapasitas internal, lalu dilanjutkan dengan ekspansi pelaksanaan kegiatan dan penguatan pengaruh eksternal kecamatan dalam koordinasi kewilayahan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan system pelayanan administratif	Penguatan kapasitas dan peran kelembagan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga dalam proses perencanaan	Penguatan ketentraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan	Optimalisasi tata kelola urusan pemerintahan umum yang terkoordinasi melalui penguatan peran forkopimcam dan penguatan	Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penataan ruang pelayanan yang nyaman, penyediaan sarana digital, serta optimalisasi layanan PATEN menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pengaduan publik juga diperkuat untuk memastikan transparansi dan responsivitas layanan</p>	<p>pembangunan secara partisipatif</p> <p>Penguatan partisipasi dan kapasitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang melibatkan organisasi masyarakat seperti PKK, karang taruna, RT/RW, serta posyandu. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk menjadi instrumen ekonomi lokal yang mendukung kemandirian desa. Peningkatan kualitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan juga menjadi fokus, sebagai upaya mendorong perencanaan yang</p>	<p>Menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan kewilayahan dengan memperkuat peran dan sinergi antarinstansi yang tergabung dalam struktur pemerintahan kewilayahan, seperti unsur kepolisian, TNI, dan instansi teknis lainnya. Sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban ditingkatkan melalui penguatan mekanisme komunikasi internal serta pelaksanaan forum koordinasi yang terjadwal dan responsif terhadap dinamika sosial</p>	<p>integritas social masyarakat</p> <p>Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menuntut koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif, terutama dalam merespons isu-isu sosial, menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan, dan menumbuhkan ketahanan sosial masyarakat. Sinergi antarinstansi seperti kecamatan, kepolisian sektor, koramil, dan unsur keagamaan untuk menyatukan langkah kebijakan di wilayah. Selain penguatan koordinatif, strategi ini juga mencakup pembinaan wawasan kebangsaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan dialog kebangsaan bersama tokoh masyarakat, pelajar, pemuda, dan organisasi sosial.</p>	<p>Optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembinaan dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola desa. Kecamatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berjalan akuntabel dan transparan</p>

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.			

3.4 Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025–2029, operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) menjadi komponen penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara terukur, konsisten, dan akuntabel. Operasionalisasi NSPK tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya konkret untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang.

Tugas kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan, penerapan NSPK dilakukan melalui penyesuaian berbagai aspek teknis dan prosedural dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini antara lain mencakup penyesuaian terhadap standar waktu penyelesaian pelayanan administrasi, penyusunan dan

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai dengan ketentuan pusat, pengelolaan layanan administrasi terpadu (PATEN) yang mencakup jenis layanan wajib, serta prosedur pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelayanan. Seluruh aspek tersebut mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian sektoral lainnya, termasuk pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Implementasi NSPK tersebut dijalankan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang, khususnya pada kebijakan yang mendorong restrukturisasi kebijakan daerah agar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterjangkauan layanan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi operasionalisasi NSPK diarahkan untuk mendukung terwujudnya sinergitas antarunit kerja dalam lingkungan kecamatan, memperkuat kolaborasi antara kecamatan dengan desa serta lintas sektor kewilayahan, dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Jombang terselenggara secara konsisten, transparan, dan sesuai standar nasional.

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Jombang

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	<p>Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti standar waktu pelayanan, alur SOP pelayanan, jenis layanan PATEN, dan prosedur pelibatan masyarakat</p>	<p>Restrukturisasi kebijakan daerah yang difokuskan untuk meningkatkan dampak positif pelaksanaan program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah</p>	<p>Penguatan Sinergi antarunit internal kecamatan dan kolaborasi lintas sector di tingkat kewilayahan melalui forum koordinasi, integrase pelayanan berbasis digital Dengan langkah konkret berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang representatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan system pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan 3. meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi local dan prioritas pembangunan desa. 4. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, 	

No	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			RKPDes, dan APBDes) 5. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik social, bencana, atau gangguan ketentraman. 6. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sector melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan 7. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan edukatif dan pelibatan masyarakat, terutama pemuda, tokoh masyarakat dan lembaga desa. 8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.	

Rumusan sasaran, strategi, dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

Visi : Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua			
Misi : Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sarana prasarana dan system pelayanan administratif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan yang responsentatif dan ramah masyarakat, termasuk ruang pelayanan, peralatan digital, serta fasilitas pendukung 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem pengaduan masyarakat yang cepat ditindaklanjuti, mudah diakses, serta mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan
		2. Penguatan apasitas dan peran kelembagaan masyarakat desa peningkatan kualitas partisipasi warga alam proses perencanaan pembangunan secara partisipatif.	1. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa. 2. Memperkuat sinergitas antara kecamatan dan pemerintah desa dalam menyusun dan mengawal dokumen perencanaan partisipatif (RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes). 3. Meningkatkan peran kecamatan dalam memfasilitasi program pemberdayaan berbasis potensi lokal dan prioritas pembangunan desa.
		3. Penguatan ketenteraman dan ketertiban wilayah melalui optimalisasi peran dan koordinasi lintas sektor dan penanganan gangguan keamanan	1. Membangun mekanisme deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan ketenteraman. 2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran Forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

		4. Penguatan pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa	1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan asistensi kecamatan terhadap penyusunan dokumen tata kelola pemerintahan desa.
	2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya 2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, optimalisasi penggunaan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya 3. Peningkatan kualitas pelayanan public yang cepat, tepat, professional dan mudah diakses oleh masyarakat 4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan public. 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan public berbasis teknologi 3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan public yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator

hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Jombang pada periode Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun **program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan**. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasional rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Jombang di Bawah ini:

**Gambar 4.1
Cascading Kecamatan Jombang**



4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Jombang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan peralatan rumah tangga
4. Penyediaan bahan logistik kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5. **Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan:**
1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**
Sub Kegiatan:
 1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan
 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan:**
 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah**
Sub Kegiatan:
 1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 2. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

1. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan
2. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
4. Evaluasi Kelurahan

3. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
3. Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan:

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan asset desa

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Uraian Sub Kegiatan adalah penjelasan detail mengenai kegiatan yang lebih kecil dalam suatu program atau kegiatan yang lebih besar. Uraian ini mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, lokasi, anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Jombang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Jombang
Tahun 2025-2029

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jombang							
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan				Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jombang		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

					Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang		Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang		Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

		terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang		Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pe,binaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jombang		Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jombang		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Jelakombo							
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kelurahan Jelakombo		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
--	--	--	--	--	--	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Jombatan

- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Jombatan		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
--	--	--	--	--	---	---	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Kaliwungu

- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kaliwungu		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Tersusunya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Kepanjen							
- Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kepanjen		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-------------------------------------	--------	---------	---------	--------	-----------	----------------------------------	------------

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Berikut uraian Sub Kegiatan, indikator kinerja, target serta pagu indikatif Kecamatan Jombang pada tabel dibawah:

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				12.501.861.339		12.675.507.29		12.508.746.714		12.642.970.770		12.557.447.811		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.271.463.189		8.406.492.099		8.197.252.906		8.306.347.526		8.212.403.612		
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75.05	7.254.176.707	76	7.303.243.119	77	7.167.445.178	78	7.260.835.177	79	7.167.445.178	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jombang	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.671.250		28.671.250		28.671.250		28.671.250		28.671.250		
tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	28.671.250	10	28.671.250	10	28.671.250	10	28.671.250	10	28.671.250	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jombang	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		3		2		2		3			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13.696.250		13.696.250		13.696.250		13.696.250		13.696.250		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	13.696.250	3	13.696.250	2	13.696.250	2	13.696.250	3	13.696.250		

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000		13.075.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	13.075.000	5	13.075.000	5	13.075.000	5	13.075.000	5	13.075.000		
7.01.01.2.01.0009 – Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	1.900.000	10	1.900.000	10	1.900.000	10	1.900.000	10	1.900.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.078.882.854		6.078.882.854		6.078.882.854		6.078.882.854		6.078.882.854		
Tersusunya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.078.882.854	1	6.078.882.854	1	6.078.882.854	1	6.078.882.854	1	6.078.882.854		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	43		43		43		43		43			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.980.882.854		5.980.882.854		5.980.882.854		5.980.882.854		5.980.882.854		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	43	5.980.882.854	43	5.980.882.854	43	5.980.882.854	43	5.980.882.854	43	5.980.882.854		
7.01.01.2.02.0003 – Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				94.450.000		94.450.000		94.450.000		94.450.000		94.450.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	94.450.000	12	94.450.000	12	94.450.000	12	94.450.000	12	94.450.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.550.000		3.550.000		3.550.000		3.550.000		3.550.000		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.550.000	1	3.550.000	1	3.550.000	1	3.550.000	1	3.550.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.300.000		42.300.000		42.300.000		42.300.000		42.300.000		
tersusunnya laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	43	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.300.000		42.300.000		42.300.000		42.300.000		42.300.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	43	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000	43	42.300.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				269.455.703		206.057.615		205.159.674		205.159.673		205.159.674		
tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	27	269.455.703	27	206.057.615	27	205.159.674	27	205.159.673	27	205.159.674		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	48		48		48		48		48			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	42		42		43		42		45			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55	55		55		55		55		55			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	31		31		31		31		31			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	21		21		21		21		21			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.720.520		8.356.730		8.720.520		8.720.519		8.720.519		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	27	8.720.520	27	8.356.730	27	8.720.520	27	8.720.519	27	8.720.519		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.177.678		31.292.380		30.030.649		30.030.649		30.030.650		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	31	31.177.678	31	31.292.380	31	30.030.649	31	30.030.649	31	30.030.650		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.111.505		10.111.505		10.111.505		10.111.505		10.111.505		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	21	10.111.505	21	10.111.505	21	10.111.505	21	10.111.505	21	10.111.505		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				115.657.500		115.657.500		115.657.500		115.657.500		115.657.500		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55	55	115.657.500	55	115.657.500	55	115.657.500	55	115.657.500	55	115.657.500		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.287.500		8.287.500		8.287.500		8.287.500		8.287.500		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	8.287.500	10	8.287.500	10	8.287.500	10	8.287.500	10	8.287.500		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.352.000		2.352.000		2.352.000		2.352.000		2.352.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	48	2.352.000	48	2.352.000	48	2.352.000	48	2.352.000	48	2.352.000		
7.01.01.2.06.0009 – Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.149.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	42	93.149.000	42	30.000.000	43	30.000.000	42	30.000.000	45	30.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				123.847.500		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	17	123.847.500	14	54.000.000	13	54.000.000	13	54.000.000	15	54.000.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				123.847.500		54.000.000		54.000.000		54.000.000		54.000.000		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	17	123.847.500	14	54.000.000	13	54.000.000	13	54.000.000	15	54.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				579.321.600		626.733.600		626.733.600		626.733.600		626.733.600		
tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60	579.321.600	60	626.733.600	60	626.733.600	60	626.733.600	60	626.733.600		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	46		46		46		46		46			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				104.400.000		123.300.000		123.300.000		123.300.000		123.300.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	60	104.400.000	60	123.300.000	60	123.300.000	60	123.300.000	60	123.300.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				474.921.600		503.433.600		503.433.600		503.433.600		503.433.600		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	46	474.921.600	46	503.433.600	46	503.433.600	46	503.433.600	46	503.433.600		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.697.800		266.597.800		131.697.800		225.087.800		131.697.800		
tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	10	131.697.800	10	266.597.800	10	131.697.800	10	225.087.800	10	131.697.800		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	73	73		73		73		73					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.989.800		42.989.800		42.989.800		42.989.800		42.989.800		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	10	42.989.800	10	42.989.800	10	42.989.800	10	42.989.800	10	42.989.800		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				61.120.000		196.020.000		61.120.000		154.510.000		61.120.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	4	61.120.000	4	196.020.000	4	61.120.000	4	154.510.000	4	61.120.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.588.000		27.588.000		27.588.000		27.588.000		27.588.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	73	73	27.588.000	73	27.588.000	73	27.588.000	73	27.588.000	73	27.588.000		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,05	308.208.882	76	314.171.380	77	320.730.128	78	336.434.749	79	335.880.834	7.01.0.00.0.00.06.00 01 - Kelurahan Jelakombo	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				82.304.982		85.697.480		89.429.228		93.534.149		98.049.564		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	82.304.982	2	85.697.480	2	89.429.228	2	93.534.149	2	98.049.564		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	7		7		8		7		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.637.900		4.001.690		4.401.859		4.842.044		5.326.249		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.637.900	4	4.001.690	4	4.401.859	4	4.842.044	4	5.326.249		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.470.282		12.617.310		13.879.041		15.266.945		16.793.639		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	11.470.282	1	12.617.310	1	13.879.041	1	15.266.945	1	16.793.639		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.130.400		2.343.440		2.577.784		2.835.562		3.119.118		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2.130.400	2	2.343.440	2	2.577.784	2	2.835.562	2	3.119.118		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.980.000		45.980.000		45.980.000		45.980.000		45.980.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	45.980.000	11	45.980.000	11	45.980.000	11	45.980.000	11	45.980.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.754.400		6.329.840		6.962.824		7.659.106		8.425.017		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	5.754.400	4	6.329.840	4	6.962.824	4	7.659.106	4	8.425.017		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.932.000		12.025.200		13.227.720		14.550.492		16.005.541		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	7	10.932.000	7	12.025.200	8	13.227.720	7	14.550.492	10	16.005.541		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.700.000		28.270.000		31.097.000		34.206.700		37.627.370		
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	25.700.000	2	28.270.000	3	31.097.000	3	34.206.700	5	37.627.370		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.700.000		28.270.000		31.097.000		34.206.700		37.627.370		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	25.700.000	2	28.270.000	3	31.097.000	3	34.206.700	5	37.627.370		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000	12	19.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		9.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.900.000	12	9.900.000	12	9.900.000	12	9.900.000	12	9.900.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000	12	9.600.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.783.900		133.783.900		133.783.900		142.273.900		133.783.900		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	5	133.783.900	5	133.783.900	5	133.783.900	5	142.273.900	5	133.783.900		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	14		14		14		14					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.123.900		39.123.900		39.123.900		39.123.900		39.123.900		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	5	39.123.900	5	39.123.900	5	39.123.900	5	39.123.900	5	39.123.900		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				84.900.000		84.900.000		84.900.000		93.390.000		84.900.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	84.900.000	1	84.900.000	1	84.900.000	1	93.390.000	1	84.900.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.760.000		9.760.000		9.760.000		9.760.000		9.760.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	14	9.760.000	14	9.760.000	14	9.760.000	14	9.760.000	14	9.760.000		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Jombatan Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,05	278.671.225	76	278.671.225	77	278.671.225	78	278.671.225	79	278.671.225	7.01.0.00.0.00.06.00 02 - Kelurahan Jombatan	

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.960.000		48.960.000		48.960.000		48.960.000		48.960.000		
Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48.960.000		48.960.000		48.960.000		48.960.000		48.960.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000	12	48.960.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				104.906.935		104.906.935		104.906.935		104.906.935		104.906.935		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	104.906.935	1	104.906.935	1	104.906.935	1	104.906.935	1	104.906.935		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.792.900		2.792.900		2.792.900		2.792.900		2.792.900		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.792.900	1	2.792.900	1	2.792.900	1	2.792.900	1	2.792.900		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.437.050		22.437.050		22.437.050		22.437.050		22.437.050		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.437.050	1	22.437.050	1	22.437.050	1	22.437.050	1	22.437.050		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.732.285		3.732.285		3.732.285		3.732.285		3.732.285		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	3.732.285	1	3.732.285	1	3.732.285	1	3.732.285	1	3.732.285		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.176.000		55.176.000		55.176.000		55.176.000		55.176.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.432.700		7.432.700		7.432.700		7.432.700		7.432.700		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	7.432.700	2	7.432.700	2	7.432.700	2	7.432.700	2	7.432.700		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		

7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.936.000		10.936.000		10.936.000		10.936.000		10.936.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	10.936.000	1	10.936.000	1	10.936.000	1	10.936.000	1	10.936.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				43.925.200		43.925.200		43.925.200		43.925.200		43.925.200		
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				43.925.200		43.925.200		43.925.200		43.925.200		43.925.200		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200	3	43.925.200		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.800.540		21.800.540		21.800.540		21.800.540		21.800.540		
Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10	21.800.540	10	21.800.540	10	21.800.540	10	21.800.540	10	21.800.540		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.600.540		15.600.540		15.600.540		15.600.540		15.600.540		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	15.600.540	12	15.600.540	12	15.600.540	12	15.600.540	12	15.600.540		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10	6.200.000	10	6.200.000	10	6.200.000	10	6.200.000	10	6.200.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.078.550		59.078.550		59.078.550		59.078.550		59.078.550		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	59.078.550	1	59.078.550	1	59.078.550	1	59.078.550	1	59.078.550		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16		16		16		16		16			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.883.750		11.883.750		11.883.750		11.883.750		11.883.750		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	11.883.750	3	11.883.750	3	11.883.750	3	11.883.750	3	11.883.750		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.120.000		11.120.000		11.120.000		11.120.000		11.120.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16	11.120.000	16	11.120.000	16	11.120.000	16	11.120.000	16	11.120.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.074.800		36.074.800		36.074.800		36.074.800		36.074.800		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	36.074.800	1	36.074.800	1	36.074.800	1	36.074.800	1	36.074.800		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Kaliwungu Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,05	215.743.400	76	215.743.400	77	215.743.400	78	215.743.400	79	215.743.400	7.01.0.00.0.00.06.00 03 - Kelurahan Kaliwungu	

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Tersusnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				53.340.650		53.340.650		53.340.650		53.340.650		53.340.650		
Tersusnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	53.340.650	1	53.340.650	1	53.340.650	1	53.340.650	1	53.340.650		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.438.500		3.438.500		3.438.500		3.438.500		3.438.500		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.438.500	1	3.438.500	1	3.438.500	1	3.438.500	1	3.438.500		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.412.350		7.412.350		7.412.350		7.412.350		7.412.350		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.412.350	1	7.412.350	1	7.412.350	1	7.412.350	1	7.412.350		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.312.800		1.312.800		1.312.800		1.312.800		1.312.800		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1.312.800	1	1.312.800	1	1.312.800	1	1.312.800	1	1.312.800		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				26.620.000		26.620.000		26.620.000		26.620.000		26.620.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	26.620.000	11	26.620.000	11	26.620.000	11	26.620.000	11	26.620.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.015.000		2.015.000		2.015.000		2.015.000		2.015.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.015.000	2	2.015.000	2	2.015.000	2	2.015.000	2	2.015.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.142.000		10.142.000		10.142.000		10.142.000		10.142.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	10.142.000	12	10.142.000	12	10.142.000	12	10.142.000	12	10.142.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik				21.800.000		21.800.000		21.800.000		21.800.000		21.800.000		

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tersusunya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.800.000		21.800.000		21.800.000		21.800.000		21.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000	2	21.800.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		24.600.000		
Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	24.600.000	12	24.600.000	12	24.600.000	12	24.600.000	12	24.600.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		13.800.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	12	13.800.000	12	13.800.000	12	13.800.000	12	13.800.000	12	13.800.000		

	Listrik yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		10.800.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000	12	10.800.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.082.750		69.082.750		69.082.750		69.082.750		69.082.750		
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	69.082.750	1	69.082.750	1	69.082.750	1	69.082.750	1	69.082.750		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.652.750		8.652.750		8.652.750		8.652.750		8.652.750		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	8.652.750	5	8.652.750	5	8.652.750	5	8.652.750	5	8.652.750		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.430.000		10.430.000		10.430.000		10.430.000		10.430.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	10.430.000	2	10.430.000	2	10.430.000	2	10.430.000	2	10.430.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75	75,05	214.662.975	76	294.662.975	77	214.662.975	78	214.662.975	79	214.662.975	7.01.0.00.0.00.06.00 04 - Kelurahan Kepanjen	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		46.920.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000	12	46.920.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				97.045.975		97.045.975		97.045.975		97.045.975		97.045.975		
Tersusunnya laporan penyediaan barang dan jasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1	97.045.975	1	97.045.975	1	97.045.975	1	97.045.975	1	97.045.975		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.415.500		1.415.500		1.415.500		1.415.500		1.415.500		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	1.415.500	1	1.415.500	1	1.415.500	1	1.415.500	1	1.415.500		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.717.500		9.717.500		9.717.500		9.717.500		9.717.500		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	9.717.500	2	9.717.500	2	9.717.500	2	9.717.500	2	9.717.500		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.106.975		2.106.975		2.106.975		2.106.975		2.106.975		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1	2.106.975	1	2.106.975	1	2.106.975	1	2.106.975	1	2.106.975		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.176.000		55.176.000		55.176.000		55.176.000		55.176.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000	11	55.176.000		

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.470.000		2.470.000		2.470.000		2.470.000		2.470.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2.470.000	2	2.470.000	2	2.470.000	2	2.470.000	2	2.470.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.160.000		26.160.000		26.160.000		26.160.000		26.160.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	26.160.000	12	26.160.000	12	26.160.000	12	26.160.000	12	26.160.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		30.000.000		0		0		0		
Tersusunnya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	30.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		30.000.000		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	30.000.000	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				47.412.000		47.412.000		47.412.000		47.412.000		47.412.000		

Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	47.412.000	12	47.412.000	12	47.412.000	12	47.412.000	12	47.412.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.900.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		18.900.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	18.900.000	12	18.900.000	12	18.900.000	12	18.900.000	12	18.900.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				28.512.000		28.512.000		28.512.000		28.512.000		28.512.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	28.512.000	12	28.512.000	12	28.512.000	12	28.512.000	12	28.512.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				23.285.000		73.285.000		23.285.000		23.285.000		23.285.000		
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	15	23.285.000	15	73.285.000	15	23.285.000	15	23.285.000	15	23.285.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16		16		16		16		16			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.365.000		12.365.000		12.365.000		12.365.000		12.365.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	15	12.365.000	15	12.365.000	15	12.365.000	15	12.365.000	15	12.365.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0	50.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.920.000	10.920.000		10.920.000		10.920.000		10.920.000		10.920.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	16	10.920.000	16	10.920.000	16	10.920.000	16	10.920.000	16	10.920.000	16	10.920.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.030.000	20.030.000		20.030.000		20.030.000		20.030.000		20.030.000		
Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	-	77	20.030.000	77,5	20.030.000	78	20.030.000	79	20.030.000	79,01	20.030.000	20.030.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Jombang	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				20.030.000	20.030.000		20.030.000		20.030.000		20.030.000		20.030.000		
meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	20.030.000	4	20.030.000	4	20.030.000	4	20.030.000	4	20.030.000	4		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		12		12		12						

7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10.015.000		10.015.000		10.015.000		10.015.000		10.015.000		
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	10.015.000	4	10.015.000	4	10.015.000	4	10.015.000	4	10.015.000	4	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.015.000		10.015.000		10.015.000		10.015.000		10.015.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	10.015.000	12	10.015.000	12	10.015.000	12	10.015.000	12	10.015.000	12	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				4.078.697.150		4.117.314.130		4.159.792.808		4.184.922.244		4.193.343.199		
Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Jombatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	-	100	859.351.950	100	859.351.950	100	859.351.950	100	859.351.950	100	859.351.950	100	7.01.0.00.0.00.06.00 02 - Kelurahan Jombatan
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				508.081.515		508.081.515		508.081.515		508.081.515		508.081.515		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di tingkat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9	508.081.515	9	508.081.515	9	508.081.515	9	508.081.515	9	508.081.515	9	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54.480.915		54.480.915		54.480.915		54.480.915		54.480.915		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11	54.480.915	11	54.480.915	11	54.480.915	11	54.480.915	11	54.480.915		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				238.557.800		238.557.800		238.557.800		238.557.800		238.557.800		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	238.557.800	2	238.557.800	2	238.557.800	2	238.557.800	2	238.557.800		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165.042.800		165.042.800		165.042.800		165.042.800		165.042.800		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	9	9	165.042.800	9	165.042.800	9	165.042.800	9	165.042.800	9	165.042.800		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				351.270.435		351.270.435		351.270.435		351.270.435		351.270.435		
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	10	10	351.270.435	10	351.270.435	10	351.270.435	10	351.270.435	10	351.270.435		

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				216.498.000		216.498.000		216.498.000		216.498.000		216.498.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	216.498.000	7	216.498.000	7	216.498.000	7	216.498.000	7	216.498.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	11	11	11.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				123.772.435		123.772.435		123.772.435		123.772.435		123.772.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	10	10	123.772.435	10	123.772.435	10	123.772.435	10	123.772.435	10	123.772.435		
Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kaliwungu	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	-	100	1.009.927.505	100	1.009.927.505	100	1.009.927.505	100	1.009.927.505	100	1.009.927.505	7.01.0.00.0.00.06.00 03 - Kelurahan Kaliwungu	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				674.157.200		674.157.200		674.157.200		674.157.200		674.157.200		

Terlaksanakanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	674.157.200	12	674.157.200	12	674.157.200	12	674.157.200	12	674.157.200		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	-	2		2		2		2					
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	11	11		11		11		11					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2		2		2		2					
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10.391.500		10.391.500		10.391.500		10.391.500		10.391.500		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	10.391.500	12	10.391.500	12	10.391.500	12	10.391.500	12	10.391.500		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				335.823.000		335.823.000		335.823.000		335.823.000		335.823.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	335.823.000	2	335.823.000	2	335.823.000	2	335.823.000	2	335.823.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				322.942.700		322.942.700		322.942.700		322.942.700		322.942.700		
Terlaksanakanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	11	11	322.942.700	11	322.942.700	11	322.942.700	11	322.942.700	11	322.942.700		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				335.770.305		335.770.305		335.770.305		335.770.305		335.770.305		
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	335.770.305	12	335.770.305	12	335.770.305	12	335.770.305	12	335.770.305		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				313.350.000		313.350.000		313.350.000		313.350.000		313.350.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	313.350.000	12	313.350.000	12	313.350.000	12	313.350.000	12	313.350.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				14.884.000		14.884.000		14.884.000		14.884.000		14.884.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	14.884.000	12	14.884.000	12	14.884.000	12	14.884.000	12	14.884.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				7.536.305		7.536.305		7.536.305		7.536.305		7.536.305		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang	3	3	7.536.305	3	7.536.305	3	7.536.305	3	7.536.305	3	7.536.305		

	Disediakan (Unit)													
Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kelurahan Jelakombo	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	-	100	939.172.545	100	977.789.525	100	1.020.268.203	100	1.045.397.639	100	1.053.818.594	7.01.0.00.0.00.06.00 01 - Kelurahan Jelakombo	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				629.897.800		665.595.500		704.862.970		726.460.078		730.995.471		
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	629.897.800	4	665.595.500	4	704.862.970	4	726.460.078	4	730.995.471		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3		2		2		3		3			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				33.517.700		33.517.700		33.517.700		33.517.700		33.517.700		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	12	33.517.700	12	33.517.700	12	33.517.700	12	33.517.700	12	33.517.700		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				355.977.000		391.674.700		430.942.170		452.539.278		457.074.671		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	355.977.000	2	391.674.700	2	430.942.170	3	452.539.278	3	457.074.671		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				239.403.100		239.403.100		239.403.100		239.403.100		239.403.100		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8	6	239.403.100	6	239.403.100	6	239.403.100	6	239.403.100	6	239.403.100		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan				309.274.745		312.194.025		315.405.233		318.937.561		322.823.123		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Lembaga Masyarakat di Tingkat Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Lembaga Masyarakat)	12	12	309.274.745	12	312.194.025	12	315.405.233	12	318.937.561	12	322.823.123		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Masyarakat)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang Disediakan (Unit)	2	2		3		4		4		4			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat				261.342.945		261.342.945		261.342.945		261.342.945		261.342.945		
Terselenggaranya Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Lembaga Masyarakat)	12	12	261.342.945	12	261.342.945	12	261.342.945	12	261.342.945	12	261.342.945		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat				18.739.000		18.739.000		18.739.000		18.739.000		18.739.000		

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	18.739.000	2	18.739.000	2	18.739.000	2	18.739.000	2	18.739.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				29.192.800		32.112.080		35.323.288		38.855.616		42.741.178		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	2	2	29.192.800	3	32.112.080	4	35.323.288	4	38.855.616	4	42.741.178		
Meningkatnya Capaian Kinerja Kelurahan Kepanjen	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kelurahan (%)	-	100	1.084.833.150	100	1.084.833.150	100	1.084.833.150	100	1.084.833.150	100	1.084.833.150	7.01.0.00.0.00.06.00	04 - Kelurahan Kepanjen
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				572.220.900		572.220.900		572.220.900		572.220.900		572.220.900		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Pelayanan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	572.220.900	5	572.220.900	5	572.220.900	5	572.220.900	5	572.220.900		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				18.944.750		18.944.750		18.944.750		18.944.750		18.944.750		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	18.944.750	3	18.944.750	3	18.944.750	3	18.944.750	3	18.944.750		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan				354.000.000		354.000.000		354.000.000		354.000.000		354.000.000		

Sarana dan Prasarana Kelurahan														
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5	354.000.000	5	354.000.000	5	354.000.000	5	354.000.000	5	354.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				198.276.150		198.276.150		198.276.150		198.276.150		198.276.150		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	198.276.150	5	198.276.150	5	198.276.150	5	198.276.150	5	198.276.150		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				512.612.250		512.612.250		512.612.250		512.612.250		512.612.250		
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	512.612.250	0	512.612.250	2	512.612.250	2	512.612.250	2	512.612.250		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6					
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2					
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				483.180.000		483.180.000		473.180.000		473.180.000		473.180.000		

Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	483.180.000	6	483.180.000	6	473.180.000	6	473.180.000	6	473.180.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				29.432.250		29.432.250		29.432.250		29.432.250		29.432.250		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	29.432.250	2	29.432.250	2	29.432.250	2	29.432.250	2	29.432.250		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	-	76	185.412.000	76,5	185.412.000	77	185.412.000	77,5	185.412.000	78	185.412.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Jombang	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				185.412.000		185.412.000		185.412.000		185.412.000		185.412.000		
meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	185.412.000	25	185.412.000	25	185.412.000	25	185.412.000	25	185.412.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20.412.000		20.412.000		20.412.000		20.412.000		20.412.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	20.412.000	25	20.412.000	25	20.412.000	25	20.412.000	25	20.412.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	165.000.000	4	165.000.000	4	165.000.000	4	165.000.000	4	165.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		
Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	-	50	44.055.500	50,5	44.055.500	51	44.055.500	51,5	44.055.500	52	44.055.500	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Jombang	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		
terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		44.055.500		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500	12	44.055.500			
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				75.364.500		75.364.500		75.364.500		75.364.500		75.364.500			
Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	-	76	75.364.500	77	75.364.500	78	75.364.500	79	75.364.500	80	75.364.500	7.01.000.000.06.0000 - Kecamatan Jombang		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				75.364.500		75.364.500		75.364.500		75.364.500		75.364.500			
terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	75.364.500	4	75.364.500	4	75.364.500	4	75.364.500	4	75.364.500			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100	100		100		100		100		100				
7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				27.146.500		27.146.500		27.146.500		27.146.500		27.146.500			
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	100	100	27.146.500	100	27.146.500	100	27.146.500	100	27.146.500	100	27.146.500			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				48.218.000		48.218.000		48.218.000		48.218.000		48.218.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	48.218.000	4	48.218.000	4	48.218.000	4	48.218.000	4	48.218.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		
Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jombang	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	-	76	12.251.000	77	12.251.000	78	12.251.000	79	12.251.000	80	12.251.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Jombang	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		
terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pe,binaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	32	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		12.251.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	32	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000	32	12.251.000		

4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja Perangkat Daerah selama periode perencanaan lima tahunan, sekaligus menjadi bentuk komitmen nyata dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diturunkan dari keterkaitan logis antara tujuan dan sasaran Renstra dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Seluruh indikator ini dirancang agar mampu menggambarkan seberapa efektif Perangkat Daerah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator kinerja Utama (IKU) mendukung pencapaian tujuan dan sarana RPJMD mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Jombang									
2.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	-	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	8	8	8,05	8,1	8,15	8,17	8,2	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	68	72	73	74	75	76	77	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	Indeks	75	75,5	76	76,5	77	77,5	Indikator Sasaran RPJMD dengan PD Penanggung Jawab Utama: Dispendukcapil; Kecamatan,

BAB V PENUTUP

Sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah kebijakan yang sistematis dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Renstra ini merupakan dokumen operasionalisasi dari arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029, serta menjabarkan secara teknis peran Kecamatan Jombang dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah. Seluruh isi dokumen ini dirancang untuk memperkuat fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan kewilayahan dan penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama. Penyusunan Renstra ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menegaskan perlunya penyelarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen RPJMD serta mendorong penguatan kinerja pelayanan publik melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis hasil (*result-oriented planning*).

Dokumen ini memuat hubungan kausal yang terstruktur antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga subkegiatan, dengan memperhatikan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional. Penyusunan program dari tahun 2026 hingga 2030 tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan jangka menengah, tetapi juga untuk menjamin kesinambungan arah pembangunan hingga akhir periode pelaksanaan RPJPD. Secara khusus, program dan kegiatan pada tahun 2030 dirancang sebagai pijakan awal dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun tersebut, sehingga tidak hanya menjadi penutup periode Renstra, tetapi sekaligus menjadi jembatan menuju periode perencanaan berikutnya.

Pelaksanaan Renstra ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh rencana

yang tertuang, dibutuhkan sistem pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, berjenjang, dan menyeluruh. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi mencakup analisis terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, serta efektivitas kebijakan dan strategi yang dijalankan. Hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai keberhasilan, tetapi juga menjadi masukan penting dalam perbaikan rencana kerja tahunan, pemutakhiran data dan informasi, serta penyusunan dokumen perencanaan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dokumen Renstra Kecamatan Jombang Tahun 2025–2029 ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman administratif dan legal formal semata, melainkan juga menjadi kompas strategis yang mampu memandu seluruh unsur pelaksana kecamatan dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi dokumen ini sangat ditentukan oleh komitmen kolektif, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan pengawasan yang dilakukan secara konsisten.



Jombang, 19 September 2025

CAMAT JOMBANG

MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197206211998031005